

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN



Letkol (Purn) Ngatiyana
Plt. Wali Kota Cimahi

Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83 Ayat (1) yang mengamanatkan "*Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan*"; Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, terkait hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berupaya melaksanakan amanat tersebut dengan menyusun buku profil perkembangan kependudukan tahun 2018.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berisi data dan informasi kependudukan Kota Cimahi Semester II tahun 2017 yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan yang ada di Kota Cimahi. Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun setiap tahun dengan menggunakan data SIAK akhir Desember yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya buku profil ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan/kajian dalam perumusan, perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Semoga buku profil perkembangan kependudukan ini dapat bermanfaat bagi lembaga pemerintah maupun non pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat.

Cimahi, 2018
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Cimahi

H.M. SURYADI, SH
NIP. 19600603 198203 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II GAMBARAN UMUM	3
A Sejarah Kota Cimahi	3
B. Letak Geografis	3
C. Topografi	5
D. Potensi Daerah	5
BAB III KUANTITAS PENDUDUK	7
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk	7
1. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin	7
2. Kepadatan Penduduk	9
3. Laju Pertumbuhan Penduduk	11
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	11
1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	12
2. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	17
3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	19
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	21
1. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	22
2. Rata-rata Umur Kawin Pertama (SMAM)	25
D. Kelahiran	26
1. Angka Kelahiran Kasar	27
2. Rasio Anak dan Perempuan (CWR)	29

BAB IV	KUALITAS PENDUDUK	31
	A. Pendidikan	31
	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	33
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK)	34
	3. Angka Partisipasi Murni (APM)	36
	B. Ekonomi	37
	1. Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja)	37
	2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	40
	3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran	52
	C. Keluarga	55
	1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	55
	2. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga	57
	3. Karakteristik Kepala Keluarga	58
	D. Sosial	69
	1. Penduduk Menurut Agama	69
	2. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas	70
	3. Golongan Darah	76
BAB V	MOBIL PENDUDUK	79
BAB VI	KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	82
	A. Kepemilikan Kartu Keluarga	83
	B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	84
	C. Kepemilikan Akta	86
	1. Akta Kelahiran	86
	2. Akta Perkawinan	89
	3. Akta Perceraian	91
BAB VII	PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	8
Tabel 3.2	Kepadatan Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017	9
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	12
Tabel 3.4	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua, Kota Cimahi, Tahun 2017	13
Tabel 3.5	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan, Kelurahan, Jenis Kelmain, Dan Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, Serta Umur Tua Kota Cimahi, Tahun 2017	15
Tabel 3.6	Sex Rasio Kota Cimahi Tahun 2017	18
Tabel 3.7	Sex Rasio Kota Cimahi Menurut Kecamatan dan kelurahan, Tahun 2017	
Tabel 3.8	Rasio Ketergantungan (<i>Dependancy Ratio</i>), Kota Cimahi Tahun 2017	20
Tabel 3.9	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kecamatan, Status Kawin, dan Jenis kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	22
Tabel 3.10	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, Status Kawin, dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	24
Tabel 3.11	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Nol (0) Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	28
Tabel 3.12	Angka Kelahiran Umum (GFR) Menurut Kecamatan, Kota Cimahi Tahun 2017	29
Tabel 3.13	Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun (<i>Child Women Ratio/CWR</i>) Kota Cimahi tahun 2017	30
Tabel 4.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia 7 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	32

Tabel 4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Cimahi Tahun 2017	34
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Cimahi Tahun 2017	35
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Cimahi Tahun 2017	36
Tabel 4.5	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	38
Tabel 4.6	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	39
Tabel 4.7	Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia 15-64 Tahun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	40
Tabel 4.8	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	41
Tabel 4.9	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	42
Tabel 4.10	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	43
Tabel 4.11	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	44
Tabel 4.12	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	44
Tabel 4.13	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	46
Tabel 4.14	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	47
Tabel 4.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angka Penyerapan Angkatan Kerja (<i>Employment rate</i>) Kota Cimahi, Tahun 2017	47

Tabel 4.16	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	50
Tabel 4.17	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Belum/Tidak Bekerja dan Tingkat Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	53
Tabel 4.18	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Belum/Tidak Bekerja dan Tingkat Pengangguran Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	54
Tabel 4.19	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Yang Belum/Tidak Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	55
Tabel 4.20	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga, Kota Cimahi, tahun 2017	56
Tabel 4.21	Distribusi Anggota Keluarga Menurut Status Hubungan Keluarga dan Jenis kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	57
Tabel 4.22	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	59
Tabel 4.23	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	60
Tabel 4.24	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	60
Tabel 4.25	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Status Kawin, dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	62
Tabel 4.26	Jumlah dan Proporsi Kepala keluarga Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	65
Tabel 4.27	Jumlah dan Proporsi Kepala keluarga Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	66
Tabel 4.28	Jumlah dan Proporsi Kepala keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	67

Tabel 4.29	Jumlah Penduduk Menurut Agama, Kota Cimahi, Tahun 2017	69
Tabel 4.30	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	71
Tabel 4.31	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	73
Tabel 4.32	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin, Kota Cimahi, Tahun 2017	78
Tabel 5.1	Angka Migrasi masuk, Angka Migrasi keluar, dan Angka Migrasi Netto Menurut Kecamatan, Kelurahan, Kota Cimahi tahun 2017	80
Tabel 6.1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga, Kota Cimahi, Tahun 2017	83
Tabel 6.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik, Kota Cimahi, tahun 2017	85
Tabel 6.3	Persentase Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kecamatan, Kelurahan, Kota Cimahi, Tahun 2017	86
Tabel 6.4	Persentase Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kelompok Umur, Kota Cimahi, tahun 2017	87
Tabel 6.5	Persentase Kepemilikan Akta Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kecamatan, Kelurahan, Kota Cimahi, Tahun 2017	88
Tabel 6.6	Persentase Kepemilikan Akta Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun, Kota Cimahi, Tahun 2017	89
Tabel 6.7	Persentase Kepemilikan Akta Kawin Menurut Kecamatan dan Kelurahan, Kota Cimahi, Tahun 2017	90
Tabel 6.8	Persentase Kepemilikan Akta Kawin Menurut Kelompok Umur, Kota Cimahi, Tahun 2017	91
Tabel 6.9	Persentase Kepemilikan Akta Cerai Menurut Kecamatan dan Kelurahan, Kota Cimahi, Tahun 2017	92
Tabel 6.10	Persentase Kepemilikan Akta Cerai Menurut Kelompok Umur, Kota Cimahi, tahun 2017	93

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Peta Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017	10
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017	16
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi, tahun 2016	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Aspek kependudukan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Berbagai aktivitas pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, tidak akan terlepas dari aspek kependudukan. Tujuan pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan penduduk dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien perlu didukung oleh ketersediaan data penduduk yang tepat, akurat dan mutakhir dan terolah. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mutakhir, secara terus menerus dilakukan validasi, baik yang dilakukan oleh petugas/operator yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun melalui proses pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di setiap Kecamatan.

Melalui proses pelayanan yang dilakukan di Kecamatan, data yang di-input ke dalam database Kependudukan adalah berdasarkan formulir pendaftaran penduduk yang diisi oleh pemohon KK dan KTP. Dengan demikian dapat lebih meningkatkan akurasi dan validitas data.

Berdasarkan database Kependudukan tersebut kami menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi yang menggambarkan situasi dan kondisi demografi di Kota Cimahi yang meliputi berbagai variabel Data Kependudukan.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi adalah untuk menyajikan data kependudukan Kota Cimahi, baik secara kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya beserta perkembangan kependudukan dan permasalahannya dan kepemilikan dokumen kependudukan. Disamping itu, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi ini dapat memberikan gambaran kondisi penduduk Kota Cimahi sekaligus sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Cimahi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup data kependudukan yang disajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi ini adalah komponen-komponen data yang terdapat dalam form Kartu Keluarga (KK) beserta hasil pengolahan/pengembangan dari form KK tersebut, yang antara lain meliputi data:

1. Jumlah penduduk dan persebarannya
2. Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin
3. Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan
4. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
5. Penduduk berdasarkan agama
6. Penduduk berdasarkan perkawinan
7. Penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio ketergantungan.
8. Kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk
9. Penduduk usia kerja, angkatan kerja dan Pengangguran: berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tingkat pendidikan dan persebarannya.
10. Mobilitas penduduk
11. Kepemilikan dokumen kependudukan
12. Dan lain sebagainya



Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan.

Tabel. 2.1 Wilayah Administrasi Kota Cimahi

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)
1	Cimahi Selatan	Cibeber	332,56
		Cibeureum	274,71
		Leuwigajah	393,47
		Melong	313,06
		Utama	380,20
2	Cimahi Tengah	Baros	225,00
		Cigugur Tengah	235,13
		Cimahi	84,31
		Karangmekar	131,09
		Padasuka	198,18
		Setiamanah	137,59
3	Cimahi Utara	Cibabat	287,38
		Cipageran	594,32
		Citeureup	323,54
		Pasirkaliki	127,05

Kelurahan dengan luas wilayah terluas adalah kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara dan wilayah terkecil yaitu Kelurahan Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah.

C. Topografi

Secara geografis wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara $\pm 1,050$ meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum.

Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.830 l/dt, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum (masing-masing di bawah 200 l/dt) dan Kali Cisangkan (496 l/dt), sementara itu mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dengan debit air 4 l/dt dan mata air Cisintok. Sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 49 tahun 2000, termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas

Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu 1446,59 Ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna.

D. Potensi Daerah.

Karena letaknya yang berdekatan dengan Kota Bandung, Kota Cimahi menyandang peran sebagai daerah penyangga bagi Kota Bandung. Banyak pekerja yang mencari nafkah di Kota Bandung namun bermukim di Kota Cimahi. Kota Cimahi sendiri mempunyai sektor ekonomi yang cukup aktif. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja semakin baik, sehingga bisa bersaing dengan daerah sekitarnya bahkan dengan daerah di seluruh Indonesia.

Sumber daya alam yang dimiliki Kota Cimahi sangat minim. Kota Cimahi merupakan daerah industri, kegiatan industri di Cimahi didominasi oleh tekstil, sandang, dan kulit. Kota Cimahi memiliki batik

dengan bermacam-macam motif khas Cimahi, seperti motif Curug Cimahi, Pusdik, Kujang, Ciawitali dan Cireundeu. Sektor ekonomi lainnya yang dimanfaatkan oleh warga Kota Cimahi adalah industri makanan olahan unggulan, seperti bandrek Cihanjuang, kue semprong dan lain-lain.

Di sektor pariwisata, Kota Cimahi memiliki beberapa objek wisata andalan diantaranya Kampung Adat Cireundeu, Alam Wisata Cimahi (AWC), Taman Kupu-kupu dan lain-lain. Kota Cimahi masih berpotensi untuk dapat mengembangkan sektor pariwisatanya karena memiliki beberapa wilayah yang cukup berpotensi untuk dijadikan daerah wisata, salah satunya adalah di wilayah Kelurahan Cipageran. Sektor pendidikan juga merupakan potensi yang cukup baik di kota ini. Di Kota Cimahi terdapat 16 perguruan tinggi, 8 diantaranya merupakan perguruan tinggi dengan keilmuan yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Kota Cimahi disebut juga sebagai "Kota Tentara" karena di Kota Cimahi terdapat banyak pusat pendidikan untuk tentara, di antaranya:

- Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdik Armed)
- Pusat Pendidikan Pengetahuan Militer Umum (Pusdikpengmilum)
- Sekolah Pelatih Infanteri Pusat Pendidikan Infanteri (SPI Pusdikif)
- Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan (Pusdikbekang)
- Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom)
- Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub)
- Pusat Pendidikan Jasmani (Pusdikjas)
- Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal)

Selain itu, banyak juga terdapat markas-markas tentara, seperti:

- Kodim 0609/Cimahi
- Brigif 15/Kujang II
- Koramil Cimahi
- Pussenarhanud Kodiklat AD
- Pussenarmed Kodiklat AD
- Kiban Yonzipur 3/Macan Kumbang
- Yonarmed 4/105 Parahyangan
- Tepbek Cimahi
- Rumkit Tk. II Kesdam III/Siliwangi
- Kesdim Cimahi

Dengan banyaknya pusat pendidikan tentara, asrama tentara dan fasilitas kemiliteran lainnya maka sekitar 60% wilayah Kota Cimahi digunakan oleh tentara.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Sejak memekarkan diri dari Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Juni 2001, Kota Cimahi telah menjadi daya tarik investasi untuk industri dan jasa. Namun, setelah 16 (enam belas) tahun berdiri, kota itu menghadapi masalah kepadatan penduduk yang semakin merisaukan. Kota Cimahi hanya memiliki 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan dengan penduduk 535.685 jiwa pada akhir tahun 2017 (DKB Semester II Tahun 2017).

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu yang harus dihadapi, bukan tidak mungkin angka kelahiran akan terus meningkat di setiap tahunnya dan pemerintah pun akan kesulitan untuk mensejahterakan penduduknya karena jumlah penduduk Kota Cimahi terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah ke bawah juga ikut meningkat serta kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan pun semakin terbatas.

Terkait dengan besarnya jumlah penduduk Kota Cimahi, selain menjadi permasalahan tersendiri tetapi juga mempunyai dampak positif antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dan sebagainya. Permasalahan lainnya yang tidak dapat dihindarkan dengan besarnya jumlah penduduk jika dikaitkan dengan luas wilayah akan memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan.

Disamping itu, jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Kota Cimahi tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebarannya.

1. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Cimahi sesuai hasil DKB semester II tahun 2017 sebesar 535.685 jiwa dan jumlah itu lebih rendah dari tahun 2016 (603.671 jiwa). Penurunan jumlah penduduk tersebut adalah

hasil pembersihan data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Penduduk Kota Cimahi tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

TABEL. 3.1
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN,
KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	LAKI-LAKI		PENDUDUK PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
CIMAHI SELATAN	114.182	42,25 %	111.985	42,19 %	226.167	42,22 %
KEL. CIBEBER	13.510	5,00 %	13.152	4,96 %	26.662	4,98 %
KEL. CIBEUREUM	30.122	11,15 %	29.447	11,09 %	59.569	11,12 %
KEL. LEUWIGAJAH	21.918	8,11 %	21.628	8,15 %	43.546	8,13 %
KEL. MELONG	31.462	11,64 %	31.142	11,73 %	62.604	11,69 %
KEL. UTAMA	17.170	6,35 %	16.616	6,26 %	33.786	6,31 %
CIMAHI TENGAH	78.336	28,98 %	77.274	29,11 %	155.610	29,05 %
KEL. BAROS	10.145	3,75 %	9.996	3,77 %	20.141	3,76 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	23.327	8,63 %	22.804	8,59 %	46.131	8,61 %
KEL. CIMAHI	6.366	2,36 %	6.326	2,38 %	12.692	2,37 %
KEL. KARANGMEKAR	7.915	2,93 %	8.022	3,02 %	15.937	2,98 %
KEL. PADASUKA	19.272	7,13 %	18.793	7,08 %	38.065	7,11 %
KEL. SETIAMANAH	11.311	4,19 %	11.333	4,27 %	22.644	4,23 %
CIMAHI UTARA	77.746	28,77 %	76.162	28,69 %	153.908	28,73 %
KEL. CIBABAT	26.434	9,78 %	25.840	9,74 %	52.274	9,76 %
KEL. CIPAGERAN	23.576	8,72 %	22.918	8,63 %	46.494	8,68 %
KEL. CITEUREUP	18.652	6,90 %	18.392	6,93 %	37.044	6,92 %
KEL. PASIRKALIKI	9.084	3,36 %	9.012	3,40 %	18.096	3,38 %
KOTA CIMAHI	270.264	100,00 %	265.421	100,00 %	535.685	100,00 %
		50,45 %		49,55 %		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yakni 226.167 jiwa (42,22%), diikuti Kecamatan Cimahi Tengah yakni 155.610 jiwa (29,05%), sedangkan Kecamatan Cimahi Utara memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 153.908 Jiwa (28,73%). Jika dilihat dari jenis kelamin, maka setengahnya (50,45%) penduduk Kota Cimahi adalah laki-laki dan penduduk perempuan sedikit lebih rendah (49,55%) dari penduduk laki-laki. Gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada.

Besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan merupakan hal wajar, selain dikarenakan wilayahnya yang luas, kecamatan ini juga banyak berdiri perusahaan-perusahaan industri yang menjadi magnet bagi pekerja yang ingin bekerja di Kota Cimahi serta memiliki perguruan tinggi swasta seperti Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cimahi.

2. Kepadatan Penduduk.

Kota Cimahi dengan luas wilayah 40,376 km² didiami penduduk sebanyak 535.685 jiwa dan tergolong kota yang padat dan jika tidak dikendalikan maka Kota Cimahi akan menjadi kota yang sama dengan DKI Jakarta. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Cimahi Selatan 16,94 km² Kecamatan Cimahi Utara 13,323 km² sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Cimahi Tengah seluas 10,113 km².

TABEL. 3.2
KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA CIMAHİ TAHUN 2017

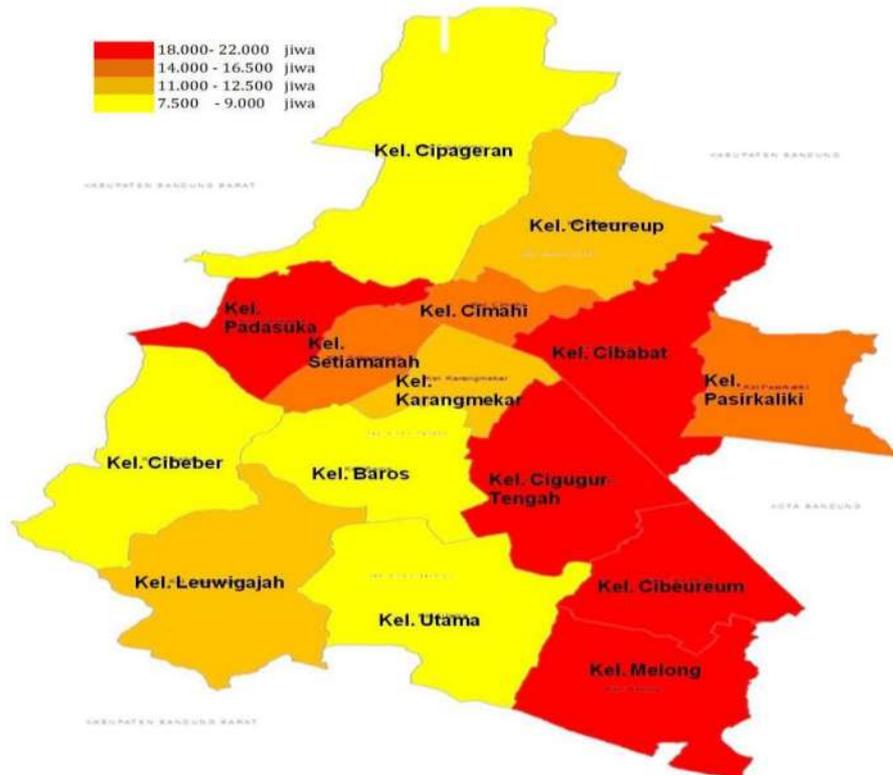
KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (Km2)*	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km2)
	n	%		
CIMAHİ SELATAN	226.167	42,22 %	16,940	13.351
KEL. CIBEBER	26.662	4,98 %	3,326	8.017
KEL. CIBEUREUM	59.569	11,12 %	2,747	21.684
KEL. LEUWIGAJAH	43.546	8,13 %	3,935	11.067
KEL. MELONG	62.604	11,69 %	3,131	19.997
KEL. UTAMA	33.786	6,31 %	3,802	8.886
CIMAHİ TENGAH	155.610	29,05 %	10,113	15.387
KEL. BAROS	20.141	3,76 %	2,250	8.952
KEL. CIGUGUR TENGAH	46.131	8,61 %	2,351	19.619
KEL. CIMAHİ	12.692	2,37 %	0,843	15.054
KEL. KARANGMEKAR	15.937	2,98 %	1,311	12.157
KEL. PADASUKA	38.065	7,11 %	1,982	19.207
KEL. SETIAMANAH	22.644	4,23 %	1,376	16.458
CIMAHİ UTARA	153.908	28,73 %	13,323	11.552
KEL. CIBABAT	52.274	9,76 %	2,877	18.170
KEL. CIPAGERAN	46.494	8,68 %	5,941	7.826
KEL. CITEUREUP	37.044	6,92 %	3,234	11.455
KEL. PASIRKALIKI	18.096	3,38 %	1,271	14.238
KOTA CIMAHİ	535.685	100,00 %	40,376	13.267

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 3.2, nampak bahwa persebaran antar wilayah di Kota Cimahi tidaklah merata, nampak bahwa Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 15.387 jiwa/km², diikuti Kecamatan Cimahi Selatan dengan kepadatan sebesar 13.351 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Cimahi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 11.552 jiwa/km². Padatnya wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dikarenakan 90 persen dari luas wilayahnya dipergunakan untuk pemukiman, perkantoran, dan pertokoan. Selain itu Kecamatan Cimahi Tengah juga merupakan pusat Kota Cimahi dan urat nadi perekonomian Kota Cimahi.

Selanjutnya apabila dilihat dalam skala kelurahan, Kelurahan Cibeureum mencapai kepadatan penduduk 21.684 jiwa/km², Kelurahan Melong yakni 19.997 jiwa/km², diikuti Kelurahan Cigugur Tengah yakni 19.619 jiwa/km², Kelurahan Padasuka yakni 19.207

jiwa/km², Kelurahan Cibabat yakni 18.170 jiwa/km². Sedangkan kelurahan dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Cipageran yakni 7.826 jiwa/km² di Kecamatan Cimahi Utara.



Gambar 3.1 Peta Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cimahi Tahun 2018

Berdasarkan fakta tersebut, maka kepadatan penduduk di wilayah Kota Cimahi perlu mendapat perhatian yang lebih serius, terutama untuk wilayah Kecamatan Cimahi Utara yang seluruh wilayahnya termasuk ke dalam wilayah Kawasan Bandung Utara, yang telah dicanangkan sebagai kawasan konservasi dan sebagai kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*) untuk wilayah cekungan Bandung. Wilayah Kecamatan Cimahi Utara yang secara geografis berada di dataran yang lebih tinggi dan udara yang sejuk telah menjadi daya tarik masyarakat dan investor untuk berinvestasi dalam bidang properti, yang pada akhirnya akan semakin mengurangi luas lahan terbuka di Kota Cimahi. Hal ini terlihat dengan telah bergesernya fungsi Kecamatan Cimahi Utara yang dahulunya menjadi sentra pertanian sekarang menjadi daerah pemukiman yakni 67,39 persen dari luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara diperuntukan untuk permukiman, perkantoran, pabrik dan sebagainya dan 32,61 persen untuk pertanian.

Melihat kondisi Kota Cimahi yang padat tersebut perlu adanya pengendalian dan pengawasan dalam penataan persebaran

penduduk, peningkatan tata ruang serta tata guna tanah melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penduduk. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka di masa yang akan datang Kota Cimahi akan menjadi kota yang sangat padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi) dimana perubahan tersebut terjadi secara terus menerus dari tahun ke tahun yang mengakibatkan jumlah penduduk mengalami perubahan secara dinamis hal ini disebut dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk akibat kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah kependudukan misalnya seperti pengangguran, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi terhadap perkembangan sosial masyarakat seperti kurangnya pangan, rendahnya pendidikan masyarakat dll.

Laju pertumbuhan Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 0,8 persen dan termasuk dalam kategori rendah yakni di kurang dari 1%. LPP Kota Cimahi tahun 2017 ini lebih kecil dibandingkan LPP Provinsi Jawa Barat yakni 1,34 persen (Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035) dan nasional 1,38 persen (Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035).

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.

Karakteristik adalah sebuah ciri-ciri khusus yang dapat membedakan suatu hal dengan hal lain yang sepadan. Maka karakteristik demografi adalah ciri-ciri khusus sebuah penduduk yang mampu membedakan penduduk tersebut dengan penduduk lain di wilayah yang berbeda.

Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau

yang disebut juga umur tunggal (*single age*), dan yang dikelompokkan dalam 5 (lima) tahunan. Dalam pembahasan demografi pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Misalnya Ani lahir pada bulan Januari tahun 1998 dan Sensus 2000 dilaksanakan pada bulan Juli. Jadi pada saat Sensus 2000 dilaksanakan Ani berusia 2 tahun 6 bulan, tetapi dalam perhitungan demografi Ani dicatat sebagai berumur 2 tahun saja.

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

TABEL. 3.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN,
KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PENDUDUK PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
0-4	17.586	6,51 %	16.618	6,26 %	34.204	6,39 %
5-9	23.062	8,53 %	21.578	8,13 %	44.640	8,33 %
10-14	23.918	8,85 %	22.811	8,59 %	46.729	8,72 %
15-19	23.758	8,79 %	22.623	8,52 %	46.381	8,66 %
20-24	23.338	8,64 %	22.240	8,38 %	45.578	8,51 %
25-29	21.288	7,88 %	20.945	7,89 %	42.233	7,88 %
30-34	21.446	7,94 %	20.947	7,89 %	42.393	7,91 %
35-39	24.203	8,96 %	23.990	9,04 %	48.193	9,00 %
40-44	22.140	8,19 %	22.711	8,56 %	44.851	8,37 %
45-49	20.130	7,45 %	19.941	7,51 %	40.071	7,48 %
50-54	15.672	5,80 %	16.331	6,15 %	32.003	5,97 %
55-59	12.528	4,64 %	12.242	4,61 %	24.770	4,62 %
60-64	9.050	3,35 %	8.846	3,33 %	17.896	3,34 %
65-69	5.468	2,02 %	5.644	2,13 %	11.112	2,07 %
70-74	3.065	1,13 %	3.632	1,37 %	6.697	1,25 %
>75	3.612	1,34 %	4.322	1,63 %	7.934	1,48 %
KOTA CIMAHI	270.264	100,00 %	265.421	100,00 %	535.685	100,00 %
	50,45 %		49,55 %			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa 6,39 persen (34.204 jiwa) penduduk Kota Cimahi merupakan balita dan jumlah balita ini masih cukup besar, hal ini menuntut perhatian pemerintah Kota Cimahi dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan. Jika diperhatikan, komposisi penduduk usia anak-anak dan remaja yang berumur 5-19 tahun sebesar 25,71 persen (137.750 jiwa), untuk itu pemerintah Kota Cimahi perlu juga memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan pendidikan terhadap anak usia sekolah ini.

Selain itu table 3.3 menggambarkan pula komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar yang berada pada penduduk berumur 35-39 tahun yakni 48.193 jiwa (9%). Gambaran yang sama untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dimana penduduk laki laki dan perempuan usia kerja terbesar juga berada pada kelompok umur 35-39 tahun.

Lebih menarik jika penduduk menurut kelompok umur ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas), hal ini untuk mempermudah di dalam analisa maupun perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 berikut.

TABEL 3.4
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR MUDA, PRODUKTIF, DAN TUA
KOTA CIMAH I TAHUN 2017

KECAMATAN/KELURAHAN JENIS KELAMIN	0-14 TAHUN (MUDA)		15-64 TAHUN (PRODUKTIF)		≥65 TAHUN (TUA)		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%	n	%
LAKI-LAKI	64.566	23,89 %	193.553	71,62 %	12.145	4,49 %	270.264	100,00 %
PEREMPUAN	61.007	22,98 %	190.816	71,89 %	13.598	5,12 %	265.421	100,00 %
KOTA CIMAH I (L+P)	125.573	23,44 %	384.369	71,75 %	25.743	4,81 %	535.685	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif perempuan (193.553 jiwa V 190.816 jiwa), hal yang sama untuk penduduk kelompok usia muda (64.566 jiwa V 61.007 jiwa). Sedangkan pada kelompok usia lanjut (≥65 tahun) terlihat bahwa jumlah penduduk lansia laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan penduduk lansia perempuan (12.145 jiwa V 13.598 jiwa), ini menunjukkan bahwa harapan hidup perempuan lebih tinggi.

Selain itu tabel 3.4 menunjukkan pula hampir tiga perempat (71,75%) penduduk Kota Cimahi pada tahun 2017 merupakan penduduk usia produktif/usia kerja (15-64 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan karena merupakan penduduk usia kerja dan sisanya 23,44 persen merupakan penduduk berusia kurang dari 15 tahun (penduduk usia muda) dan 4,81 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2017 jumlahnya masih cukup besar, oleh karena itu pemerintah Kota Cimahi harus lebih memperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan, karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang kondusif, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain Pemerintah Kota Cimahi harus mampu pula menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Lebih menarik jika penduduk kelompok umur muda, tua, dan produktif ini dikaitkan dengan wilayah kecamatan dan kelurahan sebagaimana disajikan pada tabel 3.5.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terbesar Kota Cimahi tahun 2017 berada di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan sebesar 162.786 jiwa, diikuti Kecamatan Cimahi Tengah sebesar 111.087 jiwa, dan Kecamatan Cimahi Utara sebesar 110.496 jiwa.

Jika diperhatikan menurut kelurahan, terlihat Kelurahan Melong merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar yakni 45.330 jiwa, diikuti Kelurahan Cibeureum 42.849 jiwa, Kelurahan Cibabat 37.544 jiwa, Kelurahan Cipageran 33.469 jiwa, Kelurahan Cigugur Tengah 33.162 jiwa, Kelurahan Leuwigajah 31.295 jiwa, sedangkan Kelurahan Cimahi merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk usia produktif terendah yakni 8.970 jiwa.

Disamping itu tabel 3.5 juga menggambarkan penduduk usia muda atau penduduk usia di bawah 15 tahun (0-14 tahun). Dari tabel tersebut tampak bahwa Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk usia muda tertinggi yakni 53.683 jiwa, diikuti Kecamatan Cimahi Tengah yakni 36.150 jiwa, dan Kecamatan Cimahi Utara 35.740 jiwa.

TABEL 3.5
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN, JENIS
KELAMIN, DAN KELOMPOK UMUR MUDA, UMUR PRODUKTIF, SERTA UMUR TUA,
KOTA CIMAH I TAHUN 2017

KECAMATAN/KELURAHAN JENIS KELAMIN	PENDUDUK					
	0-14 TAHUN		15-64 TAHUN		≥65 TAHUN	
	n	%	n	%	n	%
LAKI-LAKI	64.566	23,89 %	193.553	71,62 %	12.145	4,49 %
CIMAH I SELATAN	27.572	24,15 %	81.874	71,70 %	4.736	4,15 %
KEL. CIBEBER	3.327	24,63 %	9.607	71,11 %	576	4,26 %
KEL. CIBEUREUM	7.412	24,61 %	21.549	71,54 %	1.161	3,85 %
KEL. LEUWIGAJAH	5.215	23,79 %	15.752	71,87 %	951	4,34 %
KEL. MELONG	7.277	23,13 %	22.715	72,20 %	1.470	4,67 %
KEL. UTAMA	4.341	25,28 %	12.251	71,35 %	578	3,37 %
CIMAH I TENGAH	18.651	23,81 %	55.929	71,40 %	3.756	4,79 %
KEL. BAROS	2.237	22,05 %	7.354	72,49 %	554	5,46 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	5.792	24,83 %	16.699	71,59 %	836	3,58 %
KEL. CIMAH I	1.471	23,11 %	4.549	71,46 %	346	5,44 %
KEL. KARANGMEKAR	1.710	21,60 %	5.732	72,42 %	473	5,98 %
KEL. PADASUKA	4.798	24,90 %	13.528	70,20 %	946	4,91 %
KEL. SETIAMANAH	2.643	23,37 %	8.067	71,32 %	601	5,31 %
CIMAH I UTARA	18.343	23,59 %	55.750	71,71 %	3.653	4,70 %
KEL. CIBABAT	6.274	23,73 %	18.948	71,68 %	1.212	4,59 %
KEL. CIPAGERAN	5.577	23,66 %	16.962	71,95 %	1.037	4,40 %
KEL. CITEUREUP	4.458	23,90 %	13.345	71,55 %	849	4,55 %
KEL. PASIRKALIKI	2.034	22,39 %	6.495	71,50 %	555	6,11 %
PEREMPUAN	61.007	22,98 %	190.816	71,89 %	13.598	5,12 %
CIMAH I SELATAN	26.111	23,32 %	80.912	72,25 %	4.962	4,43 %
KEL. CIBEBER	3.072	23,36 %	9.509	72,30 %	571	4,34 %
KEL. CIBEUREUM	6.986	23,72 %	21.300	72,33 %	1.161	3,94 %
KEL. LEUWIGAJAH	5.006	23,15 %	15.543	71,87 %	1.079	4,99 %
KEL. MELONG	6.998	22,47 %	22.615	72,62 %	1.529	4,91 %
KEL. UTAMA	4.049	24,37 %	11.945	71,89 %	622	3,74 %
CIMAH I TENGAH	17.499	22,65 %	55.158	71,38 %	4.617	5,97 %
KEL. BAROS	2.130	21,31 %	7.100	71,03 %	766	7,66 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	5.437	23,84 %	16.463	72,19 %	904	3,96 %
KEL. CIMAH I	1.403	22,18 %	4.421	69,89 %	502	7,94 %
KEL. KARANGMEKAR	1.689	21,05 %	5.710	71,18 %	623	7,77 %
KEL. PADASUKA	4.316	22,97 %	13.440	71,52 %	1.037	5,52 %
KEL. SETIAMANAH	2.524	22,27 %	8.024	70,80 %	785	6,93 %
CIMAH I UTARA	17.397	22,84 %	54.746	71,88 %	4.019	5,28 %
KEL. CIBABAT	5.866	22,70 %	18.596	71,97 %	1.378	5,33 %
KEL. CIPAGERAN	5.280	23,04 %	16.507	72,03 %	1.131	4,93 %
KEL. CITEUREUP	4.241	23,06 %	13.214	71,85 %	937	5,09 %
KEL. PASIRKALIKI	2.010	22,30 %	6.429	71,34 %	573	6,36 %
KOTA CIMAH I (L+P)	125.573	23,44 %	384.369	71,75 %	25.743	4,81 %
CIMAH I SELATAN	53.683	23,74 %	162.786	71,98 %	9.698	4,29 %
KEL. CIBEBER	6.399	24,00 %	19.116	71,70 %	1.147	4,30 %
KEL. CIBEUREUM	14.398	24,17 %	42.849	71,93 %	2.322	3,90 %
KEL. LEUWIGAJAH	10.221	23,47 %	31.295	71,87 %	2.030	4,66 %
KEL. MELONG	14.275	22,80 %	45.330	72,41 %	2.999	4,79 %
KEL. UTAMA	8.390	24,83 %	24.196	71,62 %	1.200	3,55 %
CIMAH I TENGAH	36.150	23,23 %	111.087	71,39 %	8.373	5,38 %
KEL. BAROS	4.367	21,68 %	14.454	71,76 %	1.320	6,55 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	11.229	24,34 %	33.162	71,89 %	1.740	3,77 %
KEL. CIMAH I	2.874	22,64 %	8.970	70,67 %	848	6,68 %
KEL. KARANGMEKAR	3.399	21,33 %	11.442	71,80 %	1.096	6,88 %
KEL. PADASUKA	9.114	23,94 %	26.968	70,85 %	1.983	5,21 %
KEL. SETIAMANAH	5.167	22,82 %	16.091	71,06 %	1.386	6,12 %
CIMAH I UTARA	35.740	23,22 %	110.496	71,79 %	7.672	4,98 %
KEL. CIBABAT	12.140	23,22 %	37.544	71,82 %	2.590	4,95 %
KEL. CIPAGERAN	10.857	23,35 %	33.469	71,99 %	2.168	4,66 %
KEL. CITEUREUP	8.699	23,48 %	26.559	71,70 %	1.786	4,82 %
KEL. PASIRKALIKI	4.044	22,35 %	12.924	71,42 %	1.128	6,23 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika dilihat menurut kelurahan, tabel 3.5 menjelaskan bahwa Kelurahan Cibeureum merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk usia muda terbesar yakni 14.398 jiwa, diikuti Kelurahan Melong 14.275 jiwa, Kelurahan Cibabat 12.140 jiwa, Kelurahan Cigugur Tengah 11.229 jiwa, Kelurahan Cipageran 10.857 jiwa, Kelurahan Leuwigajah 10.221 jiwa, sedangkan Kelurahan Cimahi merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk usia muda terendah yakni 2.874 jiwa.

Terkait struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.



Piramida penduduk Kota Cimahi menunjukkan struktur penduduk konstruktif dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida masih terlihat lebar. Ini menunjukkan angka kelahiran masih tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-14

tahun masih terlihat lebar pula, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini dan juga lapangan kerja.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 15-49 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar, diduga kelompok umur ini adalah penduduk Kota Cimahi ditambah dengan migran yang masuk ke Kota Cimahi untuk bekerja dan sekolah. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil (4,81%). Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kota Cimahi termasuk dalam kategori penduduk tua. Dimana umur median penduduk Kota Cimahi Tahun 2017 adalah 30,95 tahun, yang berarti setengah penduduk Kota Cimahi pada tahun 2017 berusia di bawah 30,95 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 30,95 tahun, dengan kata lain, penduduk Kota Cimahi dikategorikan sebagai penduduk yang sedang menuju ke penduduk tua (*old population*). Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20 tahun, penduduk menengah jika median umur 20-30 tahun, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Umur median Kota Cimahi tahun 2017 ini lebih tinggi dari umur median nasional yakni 28,3 tahun .

2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis kelamin (RJK) atau Sex Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, dalam bidang pendidikan harus berwawasan gender dengan memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan

dalam umur yang sama. Selain itu, informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

TABEL. 3.6
SEX RASIO KOTA CIMAHY TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		SEX RASIO
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0-4	17.586	16.618	105,83
5-9	23.062	21.578	106,88
10-14	23.918	22.811	104,85
15-19	23.758	22.623	105,02
20-24	23.338	22.240	104,94
25-29	21.288	20.945	101,64
30-34	21.446	20.947	102,38
35-39	24.203	23.990	100,89
40-44	22.140	22.711	97,49
45-49	20.130	19.941	100,95
50-54	15.672	16.331	95,96
55-59	12.528	12.242	102,34
60-64	9.050	8.846	102,31
65-69	5.468	5.644	96,88
70-74	3.065	3.632	84,39
≥75	3.612	4.322	83,57
KOTA CIMAHY	270.264	265.421	101,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 3.6. nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kota Cimahi tahun 2017 adalah 101,82 yang berarti bahwa terdapat 101-102 orang laki-laki untuk setiap 100 perempuan dan gambaran Sex Rasio Kota Cimahi tahun 2017 ini hampir sama dengan gambaran sex rasio Provinsi Jawa Barat yakni 102,80 (Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017) dan nasional yakni lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk perempuan lebih besar pada kelompok umur 40-44 tahun, 50-54 tahun dan kelompok umur tua yakni di atas 65 tahun. Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun adalah 105,83 yang artinya terdapat 105-106 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan. Namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan.

Jika sex rasio dilihat menurut kecamatan sebagaimana tabel 3.7 berikut:

TABEL 3.7
SEX RASIO KOTA CIMAHI MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN 2017

KECAMATAN KELURAHAN	PENDUDUK		SEX RASIO
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
CIMAHI SELATAN	114.182	111.985	101,96
KEL. CIBEBER	13.510	13.152	102,72
KEL. CIBEUREUM	30.122	29.447	102,29
KEL. LEUWIGAJAH	21.918	21.628	101,34
KEL. MELONG	31.462	31.142	101,03
KEL. UTAMA	17.170	16.616	103,33
CIMAHI TENGAH	78.336	77.274	101,37
KEL. BAROS	10.145	9.996	101,49
KEL. CIGUGUR TENGAH	23.327	22.804	102,29
KEL. CIMAHI	6.366	6.326	100,63
KEL. KARANGMEKAR	7.915	8.022	98,67
KEL. PADASUKA	19.272	18.793	102,55
KEL. SETIAMANAH	11.311	11.333	99,81
CIMAHI UTARA	77.746	76.162	102,08
KEL. CIBABAT	26.434	25.840	102,30
KEL. CIPAGERAN	23.576	22.918	102,87
KEL. CITEUREUP	18.652	18.392	101,41
KEL. PASIRKALIKI	9.084	9.012	100,80
KOTA CIMAHI	270.264	265.421	101,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi,

DKB SM II Tahun 2017, diolah

bahwa seluruh kecamatan mempunyai gambaran sex rasio yang sama yakni lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan, demikian pula halnya dengan gambaran sex rasio diseluruh kelurahan kecuali Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Setiamanah jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

3. Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka

Jika sex rasio dilihat menurut kecamatan sebagaimana tabel 3.7 berikut:

TABEL 3.7
SEX RASIO KOTA CIMAHI MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN 2017

KECAMATAN KELURAHAN	PENDUDUK		SEX RASIO
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
CIMAHI SELATAN	114.182	111.985	101,96
KEL. CIBEBER	13.510	13.152	102,72
KEL. CIBEUREUM	30.122	29.447	102,29
KEL. LEUWIGAJAH	21.918	21.628	101,34
KEL. MELONG	31.462	31.142	101,03
KEL. UTAMA	17.170	16.616	103,33
CIMAHI TENGAH	78.336	77.274	101,37
KEL. BAROS	10.145	9.996	101,49
KEL. CIGUGUR TENGAH	23.327	22.804	102,29
KEL. CIMAHI	6.366	6.326	100,63
KEL. KARANGMEKAR	7.915	8.022	98,67
KEL. PADASUKA	19.272	18.793	102,55
KEL. SETIAMANAH	11.311	11.333	99,81
CIMAHI UTARA	77.746	76.162	102,08
KEL. CIBABAT	26.434	25.840	102,30
KEL. CIPAGERAN	23.576	22.918	102,87
KEL. CITEUREUP	18.652	18.392	101,41
KEL. PASIRKALIKI	9.084	9.012	100,80
KOTA CIMAHI	270.264	265.421	101,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi,
DKB SM II Tahun 2017, diolah

bahwa seluruh kecamatan mempunyai gambaran sex rasio yang sama yakni lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan, demikian pula halnya dengan gambaran sex rasio diseluruh kelurahan kecuali Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Setiamanah jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

3. Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka

semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

TABEL 3.8
RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) KOTA CIMAH I TAHUN 2017

KECAMATAN/KELURAHAN JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO KETERGANTUNGAN		
	0-14 TH	15-64 TH	≥65 TH	MUDA	TUA	TOTAL
LAKI-LAKI	64.566	193.553	12.145	33,36	6,27	39,63
CIMAH I SELATAN	27.572	81.874	4.736	33,68	5,78	39,46
KEL. CIBEBER	3.327	9.607	576	34,63	6,00	40,63
KEL. CIBEUREUM	7.412	21.549	1.161	34,40	5,39	39,78
KEL. LEUWIGAJAH	5.215	15.752	951	33,11	6,04	39,14
KEL. MELONG	7.277	22.715	1.470	32,04	6,47	38,51
KEL. UTAMA	4.341	12.251	578	35,43	4,72	40,15
CIMAH I TENGAH	18.651	55.929	3.756	33,35	6,72	40,06
KEL. BAROS	2.237	7.354	554	30,42	7,53	37,95
KEL. CIGUGUR TENGAH	5.792	16.699	836	34,68	5,01	39,69
KEL. CIMAH I	1.471	4.549	346	32,34	7,61	39,94
KEL. KARANGMEKAR	1.710	5.732	473	29,83	8,25	38,08
KEL. PADASUKA	4.798	13.528	946	35,47	6,99	42,46
KEL. SETIAMANAH	2.643	8.067	601	32,76	7,45	40,21
CIMAH I UTARA	18.343	55.750	3.653	32,90	6,55	39,45
KEL. CIBABAT	6.274	18.948	1.212	33,11	6,40	39,51
KEL. CIPAGERAN	5.577	16.962	1.037	32,88	6,11	38,99
KEL. CITEUREUP	4.458	13.345	849	33,41	6,36	39,77
KEL. PASIRKALIKI	2.034	6.495	555	31,32	8,55	39,86
PEREMPUAN	61.007	190.816	13.598	31,97	7,13	39,10
CIMAH I SELATAN	26.111	80.912	4.962	32,27	6,13	38,40
KEL. CIBEBER	3.072	9.509	571	32,31	6,00	38,31
KEL. CIBEUREUM	6.986	21.300	1.161	32,80	5,45	38,25
KEL. LEUWIGAJAH	5.006	15.543	1.079	32,21	6,94	39,15
KEL. MELONG	6.998	22.615	1.529	30,94	6,76	37,71
KEL. UTAMA	4.049	11.945	622	33,90	5,21	39,10
CIMAH I TENGAH	17.499	55.158	4.617	31,73	8,37	40,10
KEL. BAROS	2.130	7.100	766	30,00	10,79	40,79
KEL. CIGUGUR TENGAH	5.437	16.463	904	33,03	5,49	38,52
KEL. CIMAH I	1.403	4.421	502	31,73	11,35	43,09
KEL. KARANGMEKAR	1.689	5.710	623	29,58	10,91	40,49
KEL. PADASUKA	4.316	13.440	1.037	32,11	7,72	39,83
KEL. SETIAMANAH	2.524	8.024	785	31,46	9,78	41,24
CIMAH I UTARA	17.397	54.746	4.019	31,78	7,34	39,12
KEL. CIBABAT	5.866	18.596	1.378	31,54	7,41	38,95
KEL. CIPAGERAN	5.280	16.507	1.131	31,99	6,85	38,84
KEL. CITEUREUP	4.241	13.214	937	32,09	7,09	39,19
KEL. PASIRKALIKI	2.010	6.429	573	31,26	8,91	40,18
KOTA CIMAH I (L+P)	125.573	384.369	25.743	32,67	6,70	39,37
CIMAH I SELATAN	53.683	162.786	9.698	32,98	5,96	38,94
KEL. CIBEBER	6.399	19.116	1.147	33,47	6,00	39,47
KEL. CIBEUREUM	14.398	42.849	2.322	33,60	5,42	39,02
KEL. LEUWIGAJAH	10.221	31.295	2.030	32,66	6,49	39,15
KEL. MELONG	14.275	45.330	2.999	31,49	6,62	38,11
KEL. UTAMA	8.390	24.196	1.200	34,68	4,96	39,63
CIMAH I TENGAH	36.150	111.087	8.373	32,54	7,54	40,08
KEL. BAROS	4.367	14.454	1.320	30,21	9,13	39,35
KEL. CIGUGUR TENGAH	11.229	33.162	1.740	33,86	5,25	39,11
KEL. CIMAH I	2.874	8.970	848	32,04	9,45	41,49
KEL. KARANGMEKAR	3.399	11.442	1.096	29,71	9,58	39,29
KEL. PADASUKA	9.114	26.968	1.983	33,80	7,35	41,15
KEL. SETIAMANAH	5.167	16.091	1.386	32,11	8,61	40,72
CIMAH I UTARA	35.740	110.496	7.672	32,35	6,94	39,29
KEL. CIBABAT	12.140	37.544	2.590	32,34	6,90	39,23
KEL. CIPAGERAN	10.857	33.469	2.168	32,44	6,48	38,92
KEL. CITEUREUP	8.699	26.559	1.786	32,75	6,72	39,48
KEL. PASIRKALIKI	4.044	12.924	1.128	31,29	8,73	40,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 39,37, angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 39 orang usia belum dan tidak produktif/kurang produktif (0-14 tahun dan 65+) yakni 32,67 diantaranya berasal dari kelompok muda (0-14 tahun) dan 6,70 berasal dari usia lanjut (65 tahun ke atas), ini menunjukkan besarnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif di Kota Cimahi tahun 2017. Angka ini termasuk tinggi karena penduduk usia muda penduduk Kota Cimahi masih sangat besar. Selanjutnya secara keseluruhan rasio ketergantungan Kota Cimahi tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketergantungan Provinsi Jawa Barat yakni 48,24 (SUPAS BPS, 2015) dan rasio ketergantungan penduduk nasional yakni 49,20 (SUPAS BPS, 2015).

Apabila dilihat per kecamatan, maka rasio ketergantungan total tertinggi ada di Kecamatan Cimahi Tengah yakni 40,08 dan juga merupakan kecamatan dengan rasio ketergantungan tua tertinggi yakni 7,54. Sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan dengan rasio ketergantungan total dan rasio ketergantungan muda terendah yakni 38,94 dan 5,96 dan Kecamatan Cimahi Utara merupakan kecamatan dengan rasio ketergantungan muda terendah yakni 32,35.

Rasio ketergantungan total Kota Cimahi jika dirinci menurut jenis kelamin, dari tabel 3.8 terlihat bahwa rasio ketergantungan perempuan (39,10) sedikit lebih rendah dibandingkan rasio ketergantungan laki-laki (39,63).

C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai tujuannya. Pengelompokan penduduk atau komposisi penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria sosial seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jenis pekerjaan, jenis kelamin, agama, perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam Bab Kuantitas ini yang akan dibahas adalah berkaitan dengan perkawinan,

1. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan.

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

TABEL 3.9
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN, STATUS KAWIN DAN
JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/KELURAHAN JENIS KELAMIN	PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS								JUMLAH	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		n	%
LAKI-LAKI	93.714	40,81 %	130.625	56,89 %	2.553	1,11 %	2.724	1,19 %	229.616	100,00 %
CIMAHI SELATAN	39.121	40,39 %	55.723	57,53 %	971	1,00 %	1.047	1,08 %	96.862	100,00 %
KEL. CIBEBER	4.507	39,48 %	6.655	58,30 %	132	1,16 %	121	1,06 %	11.415	100,00 %
KEL. CIBEUREUM	10.226	40,15 %	14.748	57,90 %	247	0,97 %	249	0,98 %	25.470	100,00 %
KEL. LEUWIGAJAH	7.692	41,18 %	10.550	56,49 %	192	1,03 %	243	1,30 %	18.677	100,00 %
KEL. MELONG	10.978	41,03 %	15.268	57,07 %	224	0,84 %	284	1,06 %	26.754	100,00 %
KEL. UTAMA	5.718	39,31 %	8.502	58,45 %	176	1,21 %	150	1,03 %	14.546	100,00 %
CIMAHI TENGAH	27.506	41,25 %	37.406	56,09 %	843	1,26 %	929	1,39 %	66.684	100,00 %
KEL. BAROS	3.753	42,79 %	4.778	54,47 %	115	1,31 %	125	1,43 %	8.771	100,00 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	7.861	39,94 %	11.396	57,91 %	194	0,99 %	229	1,16 %	19.680	100,00 %
KEL. CIMAHI	2.347	42,90 %	2.905	53,10 %	98	1,79 %	121	2,21 %	5.471	100,00 %
KEL. KARANGMEKAR	2.903	42,42 %	3.742	54,68 %	95	1,39 %	104	1,52 %	6.844	100,00 %
KEL. PADASUKA	6.572	40,46 %	9.262	57,02 %	199	1,23 %	211	1,30 %	16.244	100,00 %
KEL. SETIAMANAH	4.070	42,07 %	5.323	55,02 %	142	1,47 %	139	1,44 %	9.674	100,00 %
CIMAHI UTARA	27.087	41,00 %	37.496	56,75 %	739	1,12 %	748	1,13 %	66.070	100,00 %
KEL. CIBABAT	9.300	41,47 %	12.587	56,13 %	272	1,21 %	265	1,18 %	22.424	100,00 %
KEL. CIPAGERAN	8.212	40,97 %	11.404	56,89 %	203	1,01 %	227	1,13 %	20.046	100,00 %
KEL. CITEUREUP	6.435	40,64 %	9.047	57,13 %	191	1,21 %	162	1,02 %	15.835	100,00 %
KEL. PASIRKALIKI	3.140	40,44 %	4.458	57,41 %	73	0,94 %	94	1,21 %	7.765	100,00 %
PEREMPUAN	73.905	32,53 %	131.696	57,96 %	6.298	2,77 %	15.326	6,74 %	227.225	100,00 %
CIMAHI SELATAN	31.206	32,63 %	56.248	58,81 %	2.395	2,50 %	5.789	6,05 %	95.638	100,00 %
KEL. CIBEBER	3.549	31,60 %	6.703	59,68 %	273	2,43 %	706	6,29 %	11.231	100,00 %
KEL. CIBEUREUM	8.194	32,71 %	14.849	59,27 %	619	2,47 %	1.391	5,55 %	25.053	100,00 %
KEL. LEUWIGAJAH	6.113	32,98 %	10.635	57,38 %	494	2,67 %	1.291	6,97 %	18.533	100,00 %
KEL. MELONG	8.796	33,02 %	15.539	58,33 %	648	2,43 %	1.657	6,22 %	26.640	100,00 %
KEL. UTAMA	4.554	32,11 %	8.522	60,09 %	361	2,55 %	744	5,25 %	14.181	100,00 %
CIMAHI TENGAH	21.614	32,53 %	37.610	56,60 %	2.107	3,17 %	5.116	7,70 %	66.447	100,00 %
KEL. BAROS	2.799	32,36 %	4.783	55,29 %	272	3,14 %	796	9,20 %	8.650	100,00 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	6.314	32,48 %	11.440	58,85 %	502	2,58 %	1.183	6,09 %	19.439	100,00 %
KEL. CIMAHI	1.786	32,61 %	2.929	53,48 %	237	4,33 %	525	9,59 %	5.477	100,00 %
KEL. KARANGMEKAR	2.364	33,92 %	3.755	53,88 %	256	3,67 %	594	8,52 %	6.969	100,00 %
KEL. PADASUKA	5.116	31,69 %	9.350	57,92 %	481	2,98 %	1.195	7,40 %	16.142	100,00 %
KEL. SETIAMANAH	3.235	33,11 %	5.353	54,79 %	359	3,67 %	823	8,42 %	9.770	100,00 %
CIMAHI UTARA	21.085	32,37 %	37.838	58,09 %	1.796	2,76 %	4.421	6,79 %	65.140	100,00 %
KEL. CIBABAT	7.204	32,62 %	12.702	57,51 %	611	2,77 %	1.569	7,10 %	22.086	100,00 %
KEL. CIPAGERAN	6.319	32,18 %	11.505	58,58 %	532	2,71 %	1.283	6,53 %	19.639	100,00 %
KEL. CITEUREUP	5.089	32,37 %	9.142	58,14 %	455	2,89 %	1.037	6,60 %	15.723	100,00 %
KEL. PASIRKALIKI	2.473	32,15 %	4.489	58,36 %	198	2,57 %	532	6,92 %	7.692	100,00 %

KECAMATAN/KELURAHAN JENIS KELAMIN	PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS									
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
KOTA CIMAH (L+P)	167.619	36,69 %	262.321	57,42 %	8.851	1,94 %	18.050	3,95 %	456.841	100,00 %
CIMAH SELATAN	70.327	36,53 %	111.971	58,17 %	3.366	1,75 %	6.836	3,55 %	192.500	100,00 %
KEL. CIBEBER	8.056	35,57 %	13.358	58,99 %	405	1,79 %	827	3,65 %	22.646	100,00 %
KEL. CIBEUREUM	18.420	36,46 %	29.597	58,58 %	866	1,71 %	1.640	3,25 %	50.523	100,00 %
KEL. LEUWIGAJAH	13.805	37,10 %	21.185	56,93 %	686	1,84 %	1.534	4,12 %	37.210	100,00 %
KEL. MELONG	19.774	37,03 %	30.807	57,70 %	872	1,63 %	1.941	3,64 %	53.394	100,00 %
KEL. UTAMA	10.272	35,76 %	17.024	59,26 %	537	1,87 %	894	3,11 %	28.727	100,00 %
CIMAH TENGAH	49.120	36,90 %	75.016	56,35 %	2.950	2,22 %	6.045	4,54 %	133.131	100,00 %
KEL. BAROS	6.552	37,61 %	9.561	54,88 %	387	2,22 %	921	5,29 %	17.421	100,00 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	14.175	36,24 %	22.836	58,38 %	696	1,78 %	1.412	3,61 %	39.119	100,00 %
KEL. CIMAH	4.133	37,75 %	5.834	53,29 %	335	3,06 %	646	5,90 %	10.948	100,00 %
KEL. KARANGMEKAR	5.267	38,13 %	7.497	54,27 %	351	2,54 %	698	5,05 %	13.813	100,00 %
KEL. PADASUKA	11.688	36,09 %	18.612	57,47 %	680	2,10 %	1.406	4,34 %	32.386	100,00 %
KEL. SETIAMANAH	7.305	37,57 %	10.676	54,91 %	501	2,58 %	962	4,95 %	19.444	100,00 %
CIMAH UTARA	48.172	36,71 %	75.334	57,41 %	2.535	1,93 %	5.169	3,94 %	131.210	100,00 %
KEL. CIBABAT	16.504	37,08 %	25.289	56,82 %	883	1,98 %	1.834	4,12 %	44.510	100,00 %
KEL. CIPAGERAN	14.531	36,62 %	22.909	57,73 %	735	1,85 %	1.510	3,80 %	39.685	100,00 %
KEL. CITEUREUP	11.524	36,52 %	18.189	57,64 %	646	2,05 %	1.199	3,80 %	31.558	100,00 %
KEL. PASIRKALIKI	5.613	36,31 %	8.947	57,88 %	271	1,75 %	626	4,05 %	15.457	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa penduduk 10 tahun ke atas Kota Cimahi tahun 2017 didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 57,42 persen. begitu pula untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang berstatus kawin sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan (130.625 orang V 131.696 orang). Sementara penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (40,81% V 32,53%).

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai, baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk dapat menikah kembali, terutama bila perempuan tersebut sudah mandiri secara ekonomi.

Besarnya persentase penduduk perempuan yang cerai hidup dibandingkan laki-laki, diduga berhubungan dengan kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, hal tersebut seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

Jika status kawin dikaitkan dengan umur sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini.

TABEL. 3.10
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KELOMPOK UMUR, STATUS KAWIN
DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS							
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
	n	%	n	%	n	%	n	%
LAKI-LAKI	93.714	55,91 %	130.625	49,80 %	2.553	28,84 %	2.724	15,09 %
10-14	23.918	14,27 %						
15-19	23.744	14,17 %	14	0,01 %				
20-24	21.435	12,79 %	1.894	0,72 %	8	0,09 %	1	0,01 %
25-29	11.910	7,11 %	9.299	3,54 %	67	0,76 %	12	0,07 %
30-34	5.726	3,42 %	15.454	5,89 %	227	2,56 %	39	0,22 %
35-39	3.222	1,92 %	20.507	7,82 %	389	4,39 %	85	0,47 %
40-44	1.786	1,07 %	19.778	7,54 %	472	5,33 %	104	0,58 %
45-49	924	0,55 %	18.554	7,07 %	460	5,20 %	192	1,06 %
50-54	509	0,30 %	14.561	5,55 %	363	4,10 %	239	1,32 %
55-59	253	0,15 %	11.730	4,47 %	247	2,79 %	298	1,65 %
60-64	156	0,09 %	8.328	3,17 %	162	1,83 %	404	2,24 %
65-69	75	0,04 %	4.946	1,89 %	79	0,89 %	368	2,04 %
70-74	28	0,02 %	2.710	1,03 %	35	0,40 %	292	1,62 %
≥75	28	0,02 %	2.850	1,09 %	44	0,50 %	690	3,82 %
PEREMPUAN	73.905	44,09 %	131.696	50,20 %	6.298	71,16 %	15.326	84,91 %
10-14	22.811	13,61 %						
15-19	22.212	13,25 %	406	0,15 %	3	0,03 %	2	0,01 %
20-24	16.126	9,62 %	6.013	2,29 %	90	1,02 %	11	0,06 %
25-29	6.107	3,64 %	14.496	5,53 %	295	3,33 %	47	0,26 %
30-34	2.307	1,38 %	17.978	6,85 %	552	6,24 %	110	0,61 %
35-39	1.294	0,77 %	21.589	8,23 %	807	9,12 %	300	1,66 %
40-44	977	0,58 %	20.224	7,71 %	981	11,08 %	529	2,93 %
45-49	812	0,48 %	17.145	6,54 %	989	11,17 %	995	5,51 %
50-54	534	0,32 %	13.462	5,13 %	901	10,18 %	1.434	7,94 %
55-59	300	0,18 %	9.168	3,49 %	670	7,57 %	2.104	11,66 %
60-64	194	0,12 %	5.841	2,23 %	498	5,63 %	2.313	12,81 %
65-69	116	0,07 %	2.992	1,14 %	241	2,72 %	2.295	12,71 %
70-74	50	0,03 %	1.499	0,57 %	136	1,54 %	1.947	10,79 %
≥75	65	0,04 %	883	0,34 %	135	1,53 %	3.239	17,94 %
KOTA CIMAHI (L+P)	167.619	100,00 %	262.321	100,00 %	8.851	100,00 %	18.050	100,00 %
10-14	46.729	27,88 %						
15-19	45.956	27,42 %	420	0,16 %	3	0,03 %	2	0,01 %
20-24	37.561	22,41 %	7.907	3,01 %	98	1,11 %	12	0,07 %
25-29	18.017	10,75 %	23.795	9,07 %	362	4,09 %	59	0,33 %
30-34	8.033	4,79 %	33.432	12,74 %	779	8,80 %	149	0,83 %
35-39	4.516	2,69 %	42.096	16,05 %	1.196	13,51 %	385	2,13 %
40-44	2.763	1,65 %	40.002	15,25 %	1.453	16,42 %	633	3,51 %
45-49	1.736	1,04 %	35.699	13,61 %	1.449	16,37 %	1.187	6,58 %
50-54	1.043	0,62 %	28.023	10,68 %	1.264	14,28 %	1.673	9,27 %
55-59	553	0,33 %	20.898	7,97 %	917	10,36 %	2.402	13,31 %
60-64	350	0,21 %	14.169	5,40 %	660	7,46 %	2.717	15,05 %
65-69	191	0,11 %	7.938	3,03 %	320	3,62 %	2.663	14,75 %
70-74	78	0,05 %	4.209	1,60 %	171	1,93 %	2.239	12,40 %
≥75	93	0,06 %	3.733	1,42 %	179	2,02 %	3.929	21,77 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 3.10 nampak bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 10-29 tahun, Sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 30-54 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja dan berkeinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Hal ini diduga adanya peningkatan pemahaman masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi program-program keluarga berencana yang dilakukan pemerintah dan pentingnya pendidikan dan permasalahan yang terjadi pada perkawinan usia dini.

Selain itu menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada umur 35-59 tahun, sedangkan penduduk berstatus cerai mati berada pada umur 55 tahun ke atas.

Tabel 3.10 menunjukkan pula penduduk usia 15-19 tahun yang berstatus kawin sebanyak 420 orang, hal ini memerlukan perhatian Pemerintah Kota Cimahi yang berkaitan masalah kehamilan, persalinan, pasca melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan penduduk usia 15-19 tahun yang berstatus cerai hidup sebanyak 3 orang dan cerai mati sebanyak 2 orang. Dimana penduduk usia 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk dibangku sekolah. Berkaitan penduduk usia 10-19 tahun ini, Pemerintah Kota Cimahi sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi.

Dari tabel 3.10 di atas dapat diasumsikan bahwa penduduk Kota Cimahi baik laki-laki maupun perempuan melangsungkan pernikahan di usia yang cukup matang .

2. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage/SMAM*)

Singulate Mean Age at Marriage adalah perkiraan (estimasi) untuk rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan,

maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Umur perkawinan pertama penduduk perempuan Kota Cimahi tahun 2017 adalah 25 tahun dan penduduk laki-laki adalah 29 tahun. Perhitungan angka ini diperoleh dari DKB semester II tahun 2017, dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yakni 23,09 tahun (SUPAS BPS, 2015) dan Nasional (22,3 tahun) (BPS, SP 2010).

Angka perkawinan pertama ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kota Cimahi telah menunda perkawinan karena diduga mereka lebih memilih melanjutkan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Angka ini juga mencerminkan bahwa penduduk perempuan di Kota Cimahi saat memutuskan untuk membina rumah tangga telah matang secara mental dan reproduksi.

Tingginya angka rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan (hasil DKB semester II tahun 2017) dikarenakan data penduduk yang berstatus kawin yang ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penduduk yang mempunyai bukti perkawinan yang sah menurut Negara atau kemungkinan penduduk muslim yang berstatus kawin sah secara agama maupun Negara belum melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, diduga penduduk Kota Cimahi yang telah kawin secara agama atau adat tidak tercatat dalam database kependudukan dan status mereka masih belum kawin atau cerai hidup atau cerai mati.

D. Kelahiran (Fertilitas)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Istilah fertilitas juga sering disebut dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya

tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati (still live) yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Informasi kelahiran ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

1. Angka Kelahiran Kasar

Untuk menentukan jumlah kelahiran dalam satu wilayah digunakan angka kelahiran (Fertilitas). Angka kelahiran yaitu angka yang menunjukkan rata-rata jumlah bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk dalam waktu satu tahun. Besar kecilnya angka kelahiran (natalitas) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor pendorong dan faktor penghambat kelahiran.

Faktor pendorong tingginya angka kelahiran :

- a. Banyaknya perkawinan di usia muda
- b. Ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki
- c. Perasaan tersiksa bila tidak memiliki anak
- d. Ada anggapan bahwa anak dapat membantu pekerjaan orang tua
- e. Anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki

Adapun faktor yang menghambat angka kelahiran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya program KB
- b. Timbulnya kesadaran terhadap penundaan usia perkawinan
- c. Adanya UU perkawinan
- d. Semakin banyaknya wanita karier
- e. Adanya peraturan pemerintah mengenai tunjangan pegawai negeri bagi anak-anaknya

Adapun jumlah kelahiran di Kota Cimahi tahun 2017 yang dihasilkan dari DKB semester II tahun 2017 (penduduk usia nol tahun) sebagaimana terlihat pada table 3.12 di bawah yakni sebanyak 2.008 kelahiran hidup. Dimana data ini diperoleh dari pencatatan peristiwa penting yakni pembuatan akta kelahiran, sehingga kelahiran yang belum dicatatkan tidak akan terdata pada database SIAK.

Dengan jumlah kelahiran hidup yang cukup besar, maka Kota Cimahi kedepan akan menghadapi konsekuensi pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar atas kelahiran bayi-bayi tersebut, mulai saat ini sampai bayi-bayi mendapatkan pekerjaan dan menjadi ibu yang melahirkan generasi penerus.

TABEL. 3.11
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0) TAHUN MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK USIA 0 (NOL) TAHUN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
CIMAHI SELATAN	452	44,58 %	454	45,67 %	906	45,12 %
KEL. CIBEBER	48	4,73 %	35	3,52 %	83	4,13 %
KEL. CIBEUREUM	114	11,24 %	137	13,78 %	251	12,50 %
KEL. LEUWIGAJAH	87	8,58 %	96	9,66 %	183	9,11 %
KEL. MELONG	125	12,33 %	121	12,17 %	246	12,25 %
KEL. UTAMA	78	7,69 %	65	6,54 %	143	7,12 %
CIMAHI TENGAH	282	27,81 %	258	25,96 %	540	26,89 %
KEL. BAROS	38	3,75 %	38	3,82 %	76	3,78 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	80	7,89 %	66	6,64 %	146	7,27 %
KEL. CIMAHI	24	2,37 %	14	1,41 %	38	1,89 %
KEL. KARANGMEKAR	25	2,47 %	21	2,11 %	46	2,29 %
KEL. PADASUKA	70	6,90 %	76	7,65 %	146	7,27 %
KEL. SETIAMANAH	45	4,44 %	43	4,33 %	88	4,38 %
CIMAHI UTARA	280	27,61 %	282	28,37 %	562	27,99 %
KEL. CIBABAT	95	9,37 %	96	9,66 %	191	9,51 %
KEL. CIPAGERAN	88	8,68 %	79	7,95 %	167	8,32 %
KEL. CITEUREUP	73	7,20 %	69	6,94 %	142	7,07 %
KEL. PASIRKALIKI	24	2,37 %	38	3,82 %	62	3,09 %
KOTA CIMAHI	1.014	100,00 %	994	100,00 %	2.008	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari table 3.11 juga nampak bahwa jumlah bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan, secara ilmiah memang bahwa kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Data penduduk Kota Cimahi usia nol tahun (data kelahiran hidup) tahun 2017 ini diduga belum semua tercatat atau dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau diduga saat bayi lahir hidup lalu meninggal saat itu juga, tidak dicatatkan sebagai kelahiran hidup tetapi dicatatkan sebagai lahir mati.

Selanjutnya jika jumlah kelahiran hidup ini dikaitkan dengan perempuan usia 15-49 tahun atau yang disebut dengan angka kelahiran umum (General Fertility Rate/GFR) yakni angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita yang berusia 15 – 49 tahun dalam satu tahun, sebagaimana table 3.12 di bawah ini.

TABEL. 3.12
ANGKA KELAHIRAN UMUM (GENERAL FERTILITY RATE/GFR) MENURUT KECAMATAN,
KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN DAN KELURAHAN	PENDUDUK PEREMPUAN 15-49 TH		PENDUDUK USIA 0 (NOL) TAHUN		ANGKA KELAHIRAN UMUM (GENERAL FERTILITY RATE/GFR)
	n	%	n	%	
	CIMAHI SELATAN	65.715	42,84 %	906	
KEL. CIBEBER	7.631	4,97 %	83	4,13 %	10,88
KEL. CIBEUREUM	17.522	11,42 %	251	12,50 %	14,32
KEL. LEUWIGAJAH	12.515	8,16 %	183	9,11 %	14,62
KEL. MELONG	17.875	11,65 %	246	12,25 %	13,76
KEL. UTAMA	10.172	6,63 %	143	7,12 %	14,06
CIMAHI TENGAH	44.276	28,86 %	540	26,89 %	12,20
KEL. BAROS	5.607	3,66 %	76	3,78 %	13,55
KEL. CIGUGUR TENGAH	13.690	8,92 %	146	7,27 %	10,66
KEL. CIMAHI	3.439	2,24 %	38	1,89 %	11,05
KEL. KARANGMEKAR	4.449	2,90 %	46	2,29 %	10,34
KEL. PADASUKA	10.703	6,98 %	146	7,27 %	13,64
KEL. SETIAMANAH	6.388	4,16 %	88	4,38 %	13,78
CIMAHI UTARA	43.406	28,30 %	562	27,99 %	12,95
KEL. CIBABAT	14.689	9,58 %	191	9,51 %	13,00
KEL. CIPAGERAN	13.157	8,58 %	167	8,32 %	12,69
KEL. CITEUREUP	10.530	6,86 %	142	7,07 %	13,49
KEL. PASIRKALIKI	5.030	3,28 %	62	3,09 %	12,33
KOTA CIMAHI	153.397	100,00 %	2.008	100,00 %	13,09

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 3.12 nampak bahwa angka kelahiran umum (GFR) Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 13,09, yang artinya bahwa dari 1.000 perempuan usia 15-49 tahun terdapat 13 kelahiran hidup.

Jika dilihat menurut kecamatan, maka Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan dengan GFR tertinggi yakni 13,79 dan Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan GFR terendah yakni 12,20

Selanjutnya jika dilihat menurut kelurahan, maka Kelurahan Leuwigajah merupakan wilayah dengan GFR tertinggi (14,62), diikuti Kelurahan Cibeureum yakni 14,32, Kelurahan Utama yakni 14,06, sedangkan Kelurahan Karangmekar merupakan kelurahan dengan GFR terendah yakni 10,34.

2. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

CWR ini berguna untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan menggambarkan berapa banyak anak di bawah 5 tahun dibandingkan dengan perempuan usia reproduksi. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. CWR ini menunjukkan beban ibu/perempuan mengurus anak.

TABEL. 3.13
RASIO ANAK BALITA TERHADAP PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN (*CHILD WOMEN RATIO/CWR*), KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN DAN KELURAHAN	PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15-49 TH		PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN		CWR
	n	%	n	%	
CIMAHI SELATAN	65.715	42,84 %	14.640	42,80 %	22,28
KEL. CIBEBER	7.631	4,97 %	1.717	5,02 %	22,50
KEL. CIBEUREUM	17.522	11,42 %	3.947	11,54 %	22,53
KEL. LEUWIGAJAH	12.515	8,16 %	2.700	7,89 %	21,57
KEL. MELONG	17.875	11,65 %	4.111	12,02 %	23,00
KEL. UTAMA	10.172	6,63 %	2.165	6,33 %	21,28
CIMAHI TENGAH	44.276	28,86 %	9.617	28,12 %	21,72
KEL. BAROS	5.607	3,66 %	1.227	3,59 %	21,88
KEL. CIGUGUR TENGAH	13.690	8,92 %	2.972	8,69 %	21,71
KEL. CIMAHI	3.439	2,24 %	734	2,15 %	21,34
KEL. KARANGMEKAR	4.449	2,90 %	879	2,57 %	19,76
KEL. PADASUKA	10.703	6,98 %	2.430	7,10 %	22,70
KEL. SETIAMANAH	6.388	4,16 %	1.375	4,02 %	21,52
CIMAHI UTARA	43.406	28,30 %	9.947	29,08 %	22,92
KEL. CIBABAT	14.689	9,58 %	3.478	10,17 %	23,68
KEL. CIPAGERAN	13.157	8,58 %	2.958	8,65 %	22,48
KEL. CITEUREUP	10.530	6,86 %	2.359	6,90 %	22,40
KEL. PASIRKALIKI	5.030	3,28 %	1.152	3,37 %	22,90
KOTA CIMAHI	153.397	100,00 %	34.204	100,00 %	22,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 3.13 menggambarkan besarnya rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio-CWR*) di Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 22,30. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia reproduktif terdapat 22 anak usia 0-4 tahun. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita.

Dari tabel 3,13 terlihat pula bahwa Kecamatan Cimahi Utara merupakan wilayah kecamatan dengan CWR tertinggi yakni sebesar 22,92, sedangkan Kecamatan Cimahi Tengah adalah kecamatan dengan CWR terendah yakni 21,72.

Jika dilihat menurut wilayah kelurahan, maka Kelurahan Cibabat merupakan wilayah dengan CWR tertinggi yakni 23,68 dan diikuti Kelurahan Melong yakni 23,00. Sedangkan Kelurahan Karangmekar merupakan wilayah dengan CWR terendah yakni 19,76.

Dengan CWR yang besar, maka peran Pemerintah Kota Cimahi untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan penundaan kehamilan, dan permasalahan berkaitan dengan perkawinan usia muda.

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan berkaitan dengan mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengembangan potensi penduduk dapat dikembangkan. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika pemerintah Indonesia menempatkan kualitas penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

Data pendidikan yang ada pada database SIAK adalah data penduduk yang telah tamat sekolah dan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi, maka merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh

oleh seseorang misalnya penduduk hanya sekolah sampai kelas 2 SLTP atau kelas 3 SLTP tapi tidak memperoleh ijazah.

Jumlah dan Proporsi penduduk Kota Cimahi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel 4.1.

TABEL. 4.1
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA 7 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	PENDUDUK USIA 7 TAHUN KE ATAS					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	4.829	1,98 %	4.536	1,89 %	9.365	1,93 %
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	26.700	10,96 %	25.686	10,69 %	52.386	10,82 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	40.720	16,71 %	48.590	20,22 %	89.310	18,45 %
SLTP/SEDERAJAT	46.689	19,16 %	50.586	21,05 %	97.275	20,10 %
SLTA/SEDERAJAT	92.050	37,78 %	79.607	33,12 %	171.657	35,47 %
DIPLOMA I/II	2.742	1,13 %	3.931	1,64 %	6.673	1,38 %
AKADEMI/D-III/S MUDA	9.230	3,79 %	9.724	4,05 %	18.954	3,92 %
DIPLOMA IV/STRATA I	17.905	7,35 %	16.107	6,70 %	34.012	7,03 %
STRATA II	2.441	1,00 %	1.440	0,60 %	3.881	0,80 %
STRATA III	334	0,14 %	138	0,06 %	472	0,10 %
KOTA CIMAH	243.640	100,00 %	240.345	100,00 %	483.985	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa kualitas penduduk Kota Cimahi menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan Tahun 2017 relatif cukup tinggi. Sepertiga (35,47%) penduduk Kota Cimahi usia 7 tahun ke atas tamat SLTA/Sederajat, tamat SLTP/Sederajat 20,10 persen dan 29,27 persen berpendidikan rendah yakni Tamat SD/Sederajat dan belum/tidak tamat SD/Sederajat. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD/Sederajat untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, gambaran yang sama untuk tamat SLTP/Sederajat.

Pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, proporsi dan jumlah yang tamat SLTA/Sederajat untuk penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki, hal yang sama untuk D-I, D-II, dan D-III/Akademi. Sedangkan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi (D-IV/S1, S2, dan S3), persentase penduduk yang menamatkan sekolah untuk perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya atau melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama pada kelompok penduduk miskin.

Lebih memprihatinkan masih adanya penduduk usia 7 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah yakni 1,93 persen (9.365 orang), terlihat angka ini kecil namun tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Cimahi.

Persentase laki-laki yang tidak/belum bersekolah lebih tinggi pada penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, untuk itu pemerintah Kota Cimahi perlu memperhatikan penduduk usia sekolah yang tidak/belum bersekolah. Sebagaimana pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berkaitan dengan masih adanya penduduk yang tidak/belum sekolah tersebut, diharapkan pemerintah Kota Cimahi melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memutakhirkan data baik pendidikan, pekerjaan, status kawin, dan sebagainya ataupun pemerintah kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pemutakhiran data agar database SIAK menjadi data yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk Kota Cimahi tahun 2017 ditunjukkan pada tabel 4.2 di bawah ini.

TABEL. 4.2
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KOTA CIMAH I TAHUN 2017

JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK YANG MASIH SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
7-12 TAHUN	54.673	48.146	88,06 %
LAKI-LAKI	28.219	24.822	87,96 %
PEREMPUAN	26.454	23.324	88,17 %
13-15 TAHUN	29.174	27.915	95,68 %
LAKI-LAKI	14.801	14.149	95,59 %
PEREMPUAN	14.373	13.766	95,78 %
16-18 TAHUN	27.565	26.458	95,98 %
LAKI-LAKI	14.107	13.571	96,20 %
PEREMPUAN	13.458	12.887	95,76 %
KOTA CIMAH I	111.412	102.519	92,02 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 4.2 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Cimahi tahun 2017 yang cukup tinggi yakni 92,02 persen. Partisipasi Sekolah penduduk untuk usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun hampir mencapai 100 persen, sedangkan untuk usia 7-12 tahun baru mencapai 88,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk usia sekolah Kota Cimahi pada tahun 2017 mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan dasar dan menengah.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding

usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

TABEL. 4.3
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) KOTA CIMAH I TAHUN 2017

JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK YANG SEDANG SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI KASAR
SD/SEDERAJAT	54.673	48.837	89,33 %
LAKI-LAKI	28.219	25.190	89,27 %
PEREMPUAN	26.454	23.647	89,39 %
SLTP/SEDERAJAT	29.174	28.159	96,52 %
LAKI-LAKI	14.801	14.367	97,07 %
PEREMPUAN	14.373	13.792	95,96 %
SLTA/SEDERAJAT	27.565	28.096	101,93 %
LAKI-LAKI	14.107	14.622	103,65 %
PEREMPUAN	13.458	13.474	100,12 %
KOTA CIMAH I	111.412	105.092	94,33 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa APK penduduk usia 16-18 tahun di Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 101,93 persen. Hal ini berarti bahwa ada 1,93 persen penduduk yang bukan usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA/Sederajat. Namun jika diperhatikan menurut jenis kelamin, APK penduduk usia 16-18 tahun untuk perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yakni 100,12 persen, hal ini berarti bahwa penduduk perempuan usia 16-18 tahun bersekolah di SLTA/Sederajat dan APK penduduk laki-laki usia 16-18 tahun sebesar 103,65 persen, hal berarti bahwa 3,65 persen laki-laki yang bukan usia 13-15 tahun bersekolah di SLTA/sederajat

Tabel 4.3 juga menggambarkan APK penduduk usia 13-15 sebesar 96,52 persen, hal ini menunjukkan bahwa ada 3,48 persen penduduk Kota Cimahi usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di SLTP/Sederajat. APK penduduk perempuan usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan APK penduduk laki-laki usia 13-15 tahun yakni 95,96 persen, hal berarti bahwa ada 4,04 persen perempuan usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SLTP/sederajat. Sedangkan APK penduduk laki-laki usia 13-15 tahun sebesar 97,07 persen atau dengan kata lain bahwa 2,93 persen penduduk laki-laki usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SLTP/Sederajat.

Begitupula halnya dengan APK penduduk usia 7-12 tahun Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 89,33 persen, hal ini berarti bahwa 10,67 persen penduduk Kota Cimahi usia 16-18 tahun tidak bersekolah di SD/Sederajat. Dilihat dari jenis kelamin, APK penduduk perempuan usia 7-12 tahun Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 89,39 persen. Hal ini berarti bahwa ada 10,61 persen penduduk perempuan usia 16-18 tahun tidak bersekolah di SD/Sederajat. Sedangkan penduduk laki-laki usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di SD/Sederajat sedikit lebih tinggi dari perempuan yakni 10,73 persen.

usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

TABEL. 4.3
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) KOTA CIMAH I TAHUN 2017

JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK YANG SEDANG SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI KASAR
SD/SEDERAJAT	54.673	48.837	89,33 %
LAKI-LAKI	28.219	25.190	89,27 %
PEREMPUAN	26.454	23.647	89,39 %
SLTP/SEDERAJAT	29.174	28.159	96,52 %
LAKI-LAKI	14.801	14.367	97,07 %
PEREMPUAN	14.373	13.792	95,96 %
SLTA/SEDERAJAT	27.565	28.096	101,93 %
LAKI-LAKI	14.107	14.622	103,65 %
PEREMPUAN	13.458	13.474	100,12 %
KOTA CIMAH I	111.412	105.092	94,33 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa APK penduduk usia 16-18 tahun di Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 101,93 persen. Hal ini berarti bahwa ada 1,93 persen penduduk yang bukan usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA/Sederajat. Namun jika diperhatikan menurut jenis kelamin, APK penduduk usia 16-18 tahun untuk perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yakni 100,12 persen, hal ini berarti bahwa penduduk perempuan usia 16-18 tahun bersekolah di SLTA/Sederajat dan APK penduduk laki-laki usia 16-18 tahun sebesar 103,65 persen, hal berarti bahwa 3,65 persen laki-laki yang bukan usia 13-15 tahun bersekolah di SLTA/sederajat

Tabel 4.3 juga menggambarkan APK penduduk usia 13-15 sebesar 96,52 persen, hal ini menunjukkan bahwa ada 3,48 persen penduduk Kota Cimahi usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di SLTP/Sederajat. APK penduduk perempuan usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan APK penduduk laki-laki usia 13-15 tahun yakni 95,96 persen, hal berarti bahwa ada 4,04 persen perempuan usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SLTP/sederajat. Sedangkan APK penduduk laki-laki usia 13-15 tahun sebesar 97,07 persen atau dengan kata lain bahwa 2,93 persen penduduk laki-laki usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SLTP/Sederajat.

Begitupula halnya dengan APK penduduk usia 7-12 tahun Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 89,33 persen, hal ini berarti bahwa 10,67 persen penduduk Kota Cimahi usia 16-18 tahun tidak bersekolah di SD/Sederajat. Dilihat dari jenis kelamin, APK penduduk perempuan usia 7-12 tahun Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 89,39 persen. Hal ini berarti bahwa ada 10,61 persen penduduk perempuan usia 16-18 tahun tidak bersekolah di SD/Sederajat. Sedangkan penduduk laki-laki usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di SD/Sederajat sedikit lebih tinggi dari perempuan yakni 10,73 persen.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

TABEL. 4.4
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KOTA CIMAHI TAHUN 2017

JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK YANG SEDANG SEKOLAH SESUAI UMUR SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI MURNI
SD/SEDERAJAT	54.673	47.903	87,62 %
LAKI-LAKI	28.219	24.700	87,53 %
PEREMPUAN	26.454	23.203	87,71 %
SLTP/SEDERAJAT	29.174	27.268	93,47 %
LAKI-LAKI	14.801	13.840	93,51 %
PEREMPUAN	14.373	13.428	93,43 %
SLTA/SEDERAJAT	27.565	24.458	88,73 %
LAKI-LAKI	14.107	12.553	88,98 %
PEREMPUAN	13.458	11.905	88,46 %
KOTA CIMAHI	111.412	99.629	89,42 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa APM SD/Sederajat di Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 89,42 persen. Hal ini berarti bahwa hanya 89,42 persen penduduk tepat usia 7-12 tahun bersekolah di SD/Sederajat. APM SLTP/Sederajat sebesar 93,47 persen. Hal ini berarti bahwa hanya 93,47 persen penduduk tepat usia 13-15 tahun bersekolah di SLTP/Sederajat dan APM penduduk usia 16-18 tahun sebesar 88,73 persen dan angka ini lebih rendah dari APM SD dan APM SLTP.

B. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ada otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada.. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Tenaga Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

TABEL. 4.5
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA KERJA (15-64 TAHUN) MENURUT
KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK USIA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15-19	23.758	12,27 %	22.623	11,86 %	46.381	12,07 %
20-24	23.338	12,06 %	22.240	11,66 %	45.578	11,86 %
25-29	21.288	11,00 %	20.945	10,98 %	42.233	10,99 %
30-34	21.446	11,08 %	20.947	10,98 %	42.393	11,03 %
35-39	24.203	12,50 %	23.990	12,57 %	48.193	12,54 %
40-44	22.140	11,44 %	22.711	11,90 %	44.851	11,67 %
45-49	20.130	10,40 %	19.941	10,45 %	40.071	10,43 %
50-54	15.672	8,10 %	16.331	8,56 %	32.003	8,33 %
55-59	12.528	6,47 %	12.242	6,42 %	24.770	6,44 %
60-64	9.050	4,68 %	8.846	4,64 %	17.896	4,66 %
KOTA CIMAH	193.553	100,00 %	190.816	100,00 %	384.369	100,00 %
	50,36%		49,64%		71,73%	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 4.5 menunjukkan penduduk usia kerja (15-64 tahun) Kota Cimahi tahun 2017 atau sering disebut Tenaga Kerja (*Manpower*). Dari 535.685 jiwa penduduk Kota Cimahi tahun 2017 terdapat 384.369 orang (71,73% dari total penduduk) penduduk usia kerja (15-64 tahun). Jumlah penduduk usia kerja ini cukup besar dan sesuai dengan hukum ekonomi bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi.

Apabila dilihat per jenis kelamin, bahwa jumlah penduduk usia 15-64 tahun (tenaga kerja) laki-laki lebih tinggi (50,36%) dibandingkan perempuan (49,64%). Jika dilihat menurut kelompok umur, persentase tenaga kerja tertinggi pada kelompok umur 15-49 tahun, demikian halnya dengan tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Jika diperhatikan menurut kecamatan dan kelurahan, dari table 4.6 terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan yakni sebesar 162.786 orang (42,35%) dan diikuti Kecamatan Cimahi Tengah yakni sebesar 111.087 orang (28,90%), sedangkan Kecamatan Cimahi Utara merupakan

kecamatan dengan jumlah tenaga kerja terkecil yakni 110.496 orang (28,75%).

TABEL. 4.6
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA KERJA (15-64 TAHUN) MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK USIA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
CIMAHI SELATAN	81.874	42,30 %	80.912	42,40 %	162.786	42,35 %
KEL. CIBEBER	9.607	4,96 %	9.509	4,98 %	19.116	4,97 %
KEL. CIBEUREUM	21.549	11,13 %	21.300	11,16 %	42.849	11,15 %
KEL. LEUWIGAJAH	15.752	8,14 %	15.543	8,15 %	31.295	8,14 %
KEL. MELONG	22.715	11,74 %	22.615	11,85 %	45.330	11,79 %
KEL. UTAMA	12.251	6,33 %	11.945	6,26 %	24.196	6,29 %
CIMAHI TENGAH	55.929	28,90 %	55.158	28,91 %	111.087	28,90 %
KEL. BAROS	7.354	3,80 %	7.100	3,72 %	14.454	3,76 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	16.699	8,63 %	16.463	8,63 %	33.162	8,63 %
KEL. CIMAHI	4.549	2,35 %	4.421	2,32 %	8.970	2,33 %
KEL. KARANGMEKAR	5.732	2,96 %	5.710	2,99 %	11.442	2,98 %
KEL. PADASUKA	13.528	6,99 %	13.440	7,04 %	26.968	7,02 %
KEL. SETIAMANAH	8.067	4,17 %	8.024	4,21 %	16.091	4,19 %
CIMAHI UTARA	55.750	28,80 %	54.746	28,69 %	110.496	28,75 %
KEL. CIBABAT	18.948	9,79 %	18.596	9,75 %	37.544	9,77 %
KEL. CIPAGERAN	16.962	8,76 %	16.507	8,65 %	33.469	8,71 %
KEL. CITEUREUP	13.345	6,89 %	13.214	6,92 %	26.559	6,91 %
KEL. PASIRKALIKI	6.495	3,36 %	6.429	3,37 %	12.924	3,36 %
KOTA CIMAHI	193.553	100,00 %	190.816	100,00 %	384.369	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Cimahi akan semakin besar pula kebutuhan lowongan pekerjaan (kesempatan kerja). Untuk itu, Pemerintah Kota perlu mencari jalan keluar agar tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kota Cimahi.

Selanjutnya, untuk melihat kualitas sumberdaya manusia khususnya para tenaga kerja ini, salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan formal yang ditamatkan. Jika tenaga kerja mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, maka akan meningkatkan pendapatannya. Disamping pendidikan formal, pendidikan non formal juga akan menambah atau meningkatkan pendapatannya melalui keahlian atau keterampilannya dalam bidang tertentu.

Tabel 4.7 memperlihatkan kualitas tenaga kerja Kota Cimahi menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan Tahun 2017 cukup tinggi, dimana hampir setengah (43,03%) tenaga kerja Kota Cimahi tahun 2017 tamat SLTA/Sederajat, diikuti tamat SLTP/Sederajat 24,05 persen, dan tamat SD 15,77 persen, dan lebih memprihatinkan adalah adanya tenaga kerja yang tidak bersekolah yakni 0,40 persen dan tidak tamat SD/Sederajat sebesar 0,84 persen.

TABEL. 4.7
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN MENURUT PENDIDIKAN YANG
DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	PENDUDUK USIA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK SEKOLAH	821	0,42 %	718	0,38 %	1.539	0,40 %
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	1.532	0,79 %	1.694	0,89 %	3.226	0,84 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	27.453	14,18 %	33.147	17,37 %	60.600	15,77 %
SLTP/SEDERAJAT	44.527	23,01 %	47.924	25,12 %	92.451	24,05 %
SLTA/SEDERAJAT	88.556	45,75 %	76.826	40,26 %	165.382	43,03 %
DIPLOMA I/II	2.616	1,35 %	3.773	1,98 %	6.389	1,66 %
AKADEMI/D-III/S MUDA	8.544	4,41 %	9.357	4,90 %	17.901	4,66 %
DIPLOMA IV/STRATA I	16.993	8,78 %	15.836	8,30 %	32.829	8,54 %
STRATA II	2.224	1,15 %	1.408	0,74 %	3.632	0,94 %
STRATA III	287	0,15 %	133	0,07 %	420	0,11 %
KOTA CIMAH	193.553	100,00 %	190.816	100,00 %	384.369	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Persentase tenaga kerja yang tidak tamat SD/Sederajat dan tidak sekolah ini sangatlah kecil yakni 1,24 persen, tetapi tetap perlu menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan keterampilan agar mereka mampu masuk dalam pasar kerja atau bekerja secara mandiri.

2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, baik aktif bekerja, belum bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan, cacat mental, dan cacat fisik mental. Dalam buku profil perkembangan kependudukan ini menggunakan batasan usia 15-64 tahun.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.

Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. yaitu :

- 1) Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi.

- 2) Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja
- 3) Pengangguran (*unemployment*):
 - a) Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja)
 - b) Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuh tenaganya karena kekurangan lapangan pekerjaan. Contoh: Seorang sarjana bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya.
- 4) Pengangguran tersembunyi/tersamar (*disguise employment*), artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal.

TABEL. 4.8
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15-19	1.432	0,95 %	1.164	2,13 %	2.596	1,27 %
20-24	9.520	6,33 %	6.194	11,32 %	15.714	7,66 %
25-29	16.969	11,28 %	8.530	15,59 %	25.499	12,43 %
30-34	20.723	13,78 %	8.386	15,33 %	29.109	14,19 %
35-39	24.041	15,98 %	8.662	15,83 %	32.703	15,94 %
40-44	22.084	14,68 %	7.051	12,89 %	29.135	14,20 %
45-49	20.085	13,35 %	5.767	10,54 %	25.852	12,60 %
50-54	15.602	10,37 %	4.297	7,85 %	19.899	9,70 %
55-59	12.118	8,06 %	3.086	5,64 %	15.204	7,41 %
60-64	7.845	5,22 %	1.573	2,88 %	9.418	4,59 %
KOTA CIMAH	150.419	100,00 %	54.710	100,00 %	205.129	100,00 %
	73,33%		26,67%		53,37%	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 205.129 orang atau 53,37 persen dari total tenaga kerja Kota Cimahi tahun 2017.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki yang memasuki pasar kerja jauh lebih tinggi yakni 73,33 persen (150.419 orang) di bandingkan dengan penduduk usia kerja perempuan yakni 26,67 persen (54.710 orang). Kecilnya jumlah angkatan kerja perempuan dikarenakan perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga (mengurus rumah tangga) yang tidak tergolong ke dalam angkatan kerja

atau mereka banyak yang melanjutkan sekolah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tabel 4.8 menunjukkan pula persentase angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 25-49 tahun. Namun apabila dilihat perjenis kelamin, maka proporsi angkatan kerja laki-laki tertinggi berada pada kelompok umur 25-54 tahun, sedangkan angkatan kerja perempuan tertinggi pada kelompok umur 20-49 tahun

Selanjutnya jika angkatan kerja ini dikaitkan dengan wilayah dimana mereka bermukim sebagaimana terlihat pada tabel 4.9.

TABEL. 4.9
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN
DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	LAKI-LAKI		ANGKATAN KERJA PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
CIMAHI SELATAN	63.444	42,18 %	23.278	42,55 %	86.722	42,28 %
KEL. CIBEBER	7.455	4,96 %	2.229	4,07 %	9.684	4,72 %
KEL. CIBEUREUM	16.985	11,29 %	6.311	11,54 %	23.296	11,36 %
KEL. LEUWIGAJAH	12.005	7,98 %	4.388	8,02 %	16.393	7,99 %
KEL. MELONG	17.217	11,45 %	6.717	12,28 %	23.934	11,67 %
KEL. UTAMA	9.782	6,50 %	3.633	6,64 %	13.415	6,54 %
CIMAHI TENGAH	44.018	29,26 %	16.644	30,42 %	60.662	29,57 %
KEL. BAROS	5.816	3,87 %	2.496	4,56 %	8.312	4,05 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	13.387	8,90 %	5.252	9,60 %	18.639	9,09 %
KEL. CIMAHI	3.595	2,39 %	1.298	2,37 %	4.893	2,39 %
KEL. KARANGMEKAR	4.416	2,94 %	1.759	3,22 %	6.175	3,01 %
KEL. PADASUKA	10.507	6,99 %	3.682	6,73 %	14.189	6,92 %
KEL. SETIAMANAH	6.297	4,19 %	2.157	3,94 %	8.454	4,12 %
CIMAHI UTARA	42.957	28,56 %	14.788	27,03 %	57.745	28,15 %
KEL. CIBABAT	14.626	9,72 %	5.237	9,57 %	19.863	9,68 %
KEL. CIPAGERAN	12.905	8,58 %	4.116	7,52 %	17.021	8,30 %
KEL. CITEUREUP	10.388	6,91 %	3.557	6,50 %	13.945	6,80 %
KEL. PASIRKALIKI	5.038	3,35 %	1.878	3,43 %	6.916	3,37 %
KOTA CIMAHI	150.419	100,00 %	54.710	100,00 %	205.129	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 4.9 tampak bahwa persentase angkatan kerja tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu 42,28 persen, diikuti Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 29,57 persen, sedangkan persentase terendah di Kecamatan Cimahi Utara yaitu 28,15 persen.

Selanjutnya angkatan kerja dikaitkan dengan pendidikan formal yang ditamatkan, hal ini diperlukan untuk melihat kualitas sumberdaya manusia yang akan terjun ke pasar kerja. Semakin banyak penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, diharapkan pertumbuhan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi akan semakin meningkat pula.

TABEL. 4.10
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG
DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	ANGKATAN KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK SEKOLAH	778	0,52 %	575	1,05 %	1.353	0,66 %
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	1.337	0,89 %	532	0,97 %	1.869	0,91 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	22.005	14,63 %	3.966	7,25 %	25.971	12,66 %
SLTP/SEDERAJAT	29.662	19,72 %	8.165	14,92 %	37.827	18,44 %
SLTA/SEDERAJAT	68.901	45,81 %	22.320	40,80 %	91.221	44,47 %
DIPLOMA I/II	2.244	1,49 %	1.734	3,17 %	3.978	1,94 %
AKADEMI/D-III/S MUDA	7.587	5,04 %	5.182	9,47 %	12.769	6,22 %
DIPLOMA IV/STRATA I	15.528	10,32 %	10.913	19,95 %	26.441	12,89 %
STRATA II	2.097	1,39 %	1.208	2,21 %	3.305	1,61 %
STRATA III	280	0,19 %	115	0,21 %	395	0,19 %
KOTA CIMAHI	150.419	100,00 %	54.710	100,00 %	205.129	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya, angkatan kerja Kota Cimahi cukup berpendidikan. 44,47 persen angkatan kerja Kota Cimahi berpendidikan SLTA/ sederajat, diikuti tamat SLTP/ sederajat 18,44 persen, tamat D-IV/S1 12,89 persen, tamat SD/ sederajat 12,66 persen, Akademi/Diploma III/S.Muda sebanyak 6,22 persen, Diploma I/II sebanyak 1,94 persen, dan Strata II sebanyak 1,61 persen serta yang memiliki pendidikan Strata III hanya 0,19 persen. Sedangkan yang Tidak Sekolah dan Tidak Tamat SD/ Sederajat masing-masing sebanyak 0,66 persen dan 0,91 persen.

Angkatan kerja yang tidak sekolah dan tidak tamat SD/ Sederajat persentasenya memang sangat kecil, dengan kondisi pendidikan seperti ini, pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh mereka dan kemungkinan besar angkatan kerja ini tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka akan kalah bersaing dalam peluang kesempatan kerja dan diduga mereka akan menjadi angkatan kerja yang belum/ tidak bekerja (pengangguran).

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kota Cimahi perlu memberikan perhatian kepada angkatan kerja dengan pendidikan sangat rendah tersebut melalui peningkatan keterampilan mereka, misalnya dengan menyediakan balai-balai pelatihan keterampilan.

Dengan adanya wajib belajar 9 tahun (7-15 tahun) sesuai pasal 6 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diharapkan kedepan angkatan kerja yang berpendidikan rendah dan tidak sekolah persentasenya menurun.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, persentase angkatan kerja perempuan yang menamatkan pendidikan menengah lebih rendah

dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Namun angkatan kerja perempuan yang menamatkan pendidikan tinggi (D-I, D-II, D-III/Sarmud, D-IV/Strata-I, Strata-II dan Strata-III) lebih tinggi daripada angkatan kerja laki-laki.

TABEL. 4.11
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA USIA 15-19 TAHUN MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	ANGKATAN KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK SEKOLAH	404	28,21 %	340	29,21 %	744	28,66 %
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	178	12,43 %	114	9,79 %	292	11,25 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	189	13,20 %	107	9,19 %	296	11,40 %
SLTP/SEDERAJAT	315	22,00 %	251	21,56 %	566	21,80 %
SLTA/SEDERAJAT	341	23,81 %	349	29,98 %	690	26,58 %
DIPLOMA I/II	5	0,35 %	3	0,26 %	8	0,31 %
KOTA CIMAHI	1.432	100,00 %	1.164	100,00 %	2.596	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dugaan bahwa kualitas angkatan kerja pada kelompok usia 15-19 tahun adalah rendah adalah tidak benar karena 26,58 persen tamat SLTA/ sederajat dan yang tamat SLTP/ sederajat sebesar 21,80 persen. Sedangkan yang tamat SD/ sederajat 11,40 persen dan yang berpendidikan sangat rendah 39,91 persen (tidak sekolah 28,66 % dan tidak tamat SD 11,25%). Sementara yang berpendidikan Diploma I/II hanya 0,31 persen.

TABEL. 4.12
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15-19	262	0,19 %	216	0,46 %	478	0,26 %
20-24	5.363	3,92 %	3.481	7,46 %	8.844	4,82 %
25-29	14.150	10,35 %	7.110	15,24 %	21.260	11,59 %
30-34	19.086	13,96 %	7.647	16,39 %	26.733	14,58 %
35-39	22.912	16,76 %	8.153	17,48 %	31.065	16,94 %
40-44	21.389	15,64 %	6.631	14,21 %	28.020	15,28 %
45-49	19.512	14,27 %	5.362	11,49 %	24.874	13,56 %
50-54	15.123	11,06 %	3.991	8,55 %	19.114	10,42 %
55-59	11.651	8,52 %	2.798	6,00 %	14.449	7,88 %
60-64	7.289	5,33 %	1.266	2,71 %	8.555	4,66 %
KOTA CIMAHI	136.737	100,00 %	46.655	100,00 %	183.392	100,00 %
	74,56%		25,44%		89,40%	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

TABEL. 4.13
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT KECAMATAN,
KELURAHAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
CIMAH SELATAN	57.375	41,96 %	19.642	42,10 %	77.017	42,00 %
KEL. CIBEBER	6.698	4,90 %	1.864	4,00 %	8.562	4,67 %
KEL. CIBEUREUM	15.562	11,38 %	5.292	11,34 %	20.854	11,37 %
KEL. LEUWIGAJAH	10.832	7,92 %	3.727	7,99 %	14.559	7,94 %
KEL. MELONG	15.671	11,46 %	5.741	12,31 %	21.412	11,68 %
KEL. UTAMA	8.612	6,30 %	3.018	6,47 %	11.630	6,34 %
CIMAH TENGAH	39.616	28,97 %	14.271	30,59 %	53.887	29,38 %
KEL. BAROS	5.193	3,80 %	2.210	4,74 %	7.403	4,04 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	12.154	8,89 %	4.533	9,72 %	16.687	9,10 %
KEL. CIMAH	3.192	2,33 %	1.106	2,37 %	4.298	2,34 %
KEL. KARANGMEKAR	3.995	2,92 %	1.519	3,26 %	5.514	3,01 %
KEL. PADASUKA	9.549	6,98 %	3.132	6,71 %	12.681	6,91 %
KEL. SETIAMANAH	5.533	4,05 %	1.771	3,80 %	7.304	3,98 %
CIMAH UTARA	39.746	29,07 %	12.742	27,31 %	52.488	28,62 %
KEL. CIBABAT	13.492	9,87 %	4.557	9,77 %	18.049	9,84 %
KEL. CIPAGERAN	11.987	8,77 %	3.535	7,58 %	15.522	8,46 %
KEL. CITEUREUP	9.581	7,01 %	3.008	6,45 %	12.589	6,86 %
KEL. PASIRKALIKI	4.686	3,43 %	1.642	3,52 %	6.328	3,45 %
KOTA CIMAH	136.737	100,00 %	46.655	100,00 %	183.392	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa penduduk perempuan usia 15-64 tahun hanya 24,45 persen, sementara 75,55 persen tidak bekerja. Hal ini diduga mereka berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga (bagi yang sudah berstatus kawin atau memang mereka belum memperoleh pekerjaan, atau sebetulnya mereka bekerja misalnya membuka warung, berdagang kecil-kecilan namun mereka tidak melaporkannya bahwa itu sebagai pekerjaan atau yang saat ini sedang marak adalah berdagang online atau youtubers dan mereka tidak memasukan sebagai pekerjaan.

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas angkatan kerja yang bekerja dilihat dari sisi pendidikan yang ditamatkan sebagaimana tabel 4.14.

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa angkatan kerja Kota Cimahi yang bekerja cukup berpendidikan. 44,46 persen angkatan kerja Kota Cimahi berpendidikan SLTA/ sederajat, diikuti tamat SLTP/ sederajat 17,72 persen, tamat D-IV/S1 13,96 persen, tamat SD/ sederajat 12,43 persen, Akademi/ Diploma III/ S.Muda sebanyak 6,70 persen, Diploma I/II sebanyak 2,05 persen, dan Strata II dan Strata III sebanyak 1,99 persen. Sedangkan yang Tidak Sekolah dan Tidak Tamat SD/ Sederajat masing-masing sebanyak 0,11 persen dan 0,58 persen.

TABEL. 4.14
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG
DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK SEKOLAH	137	0,10 %	58	0,12 %	195	0,11 %
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	850	0,62 %	207	0,44 %	1.057	0,58 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	19.971	14,61 %	2.831	6,07 %	22.802	12,43 %
SLTP/SEDERAJAT	26.077	19,07 %	6.419	13,76 %	32.496	17,72 %
SLTA/SEDERAJAT	62.775	45,91 %	18.760	40,21 %	81.535	44,46 %
DIPLOMA I/II	2.131	1,56 %	1.624	3,48 %	3.755	2,05 %
AKADEMI/D-III/S MUDA	7.331	5,36 %	4.949	10,61 %	12.280	6,70 %
DIPLOMA IV/STRATA I	15.105	11,05 %	10.505	22,52 %	25.610	13,96 %
STRATA II	2.082	1,52 %	1.188	2,55 %	3.270	1,78 %
STRATA III	278	0,20 %	114	0,24 %	392	0,21 %
KOTA CIMAHI	136.737	100,00 %	46.655	100,00 %	183.392	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Angkatan kerja yang bekerja yang tidak sekolah dan tidak tamat SD/Sederajat persentasenya memang sangat kecil, dengan kondisi pendidikan seperti itu, pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh mereka dan kemungkinan besar mereka tidak memiliki keterampilan dan sangat berpengaruh terhadap penghasilan dan tingkat kesejahteraannya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi melalui peningkatan keterampilan mereka dan program wirausaha agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.

TABEL. 4.15
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN ANGKA PENYERAPAN
ANGKATAN KERJA (EMPLOYMENT RATE), KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA			ANGKA PENYERAPAN ANGKATAN KERJA		
	L	P	L+P	L	P	L+P
	15-19	6,03	5,15	5,60	18,30	18,56
20-24	40,79	27,85	34,48	56,33	56,20	56,28
25-29	79,71	40,73	60,38	83,39	83,35	83,38
30-34	96,63	40,03	68,66	92,10	91,19	91,84
35-39	99,33	36,11	67,86	95,30	94,12	94,99
40-44	99,75	31,05	64,96	96,85	94,04	96,17
45-49	99,78	28,92	64,52	97,15	92,98	96,22
50-54	99,55	26,31	62,18	96,93	92,88	96,06
55-59	96,73	25,21	61,38	96,15	90,67	95,03
60-64	86,69	17,78	52,63	92,91	80,48	90,84
KOTA CIMAHI	77,71	28,67	53,37	90,90	85,28	89,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Table 4.15 menunjukkan bahwa 53,37 persen dari angkatan kerja di Kota Cimahi pada tahun 2017 berpartisipasi dalam pasar kerja. Partisipasi angkatan kerja laki-laki secara keseluruhan lebih tinggi (71,71%) daripada partisipasi angkatan kerja perempuan (28,67%), kemungkinan hal ini terkait dengan kesibukan perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Akan tetapi, keadaan ini mungkin juga terkait dengan budaya yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah.

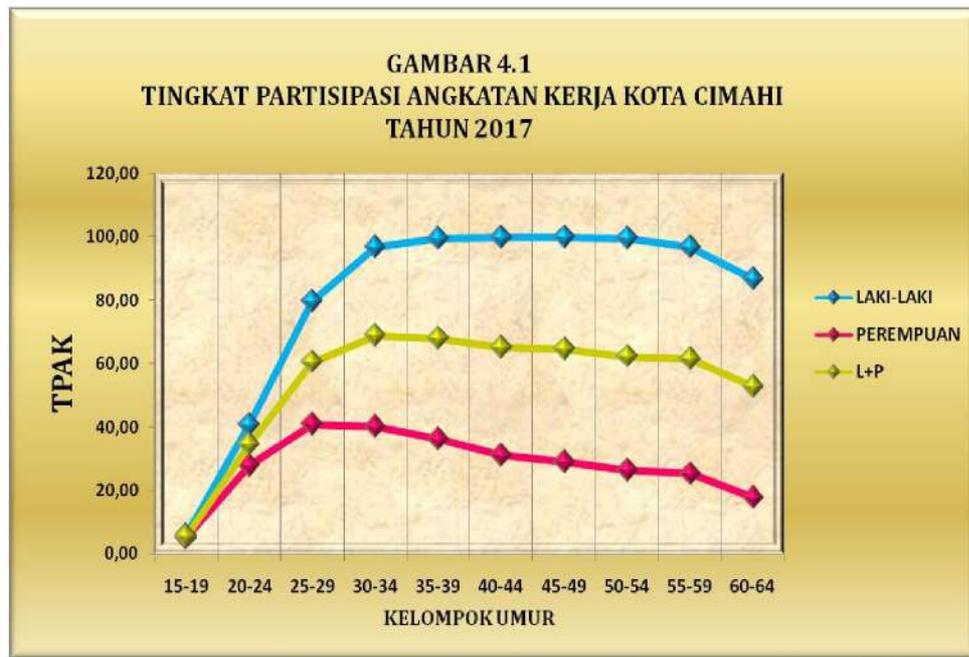
Jika diperhatikan per kelompok umur, maka hampir 100 persen angkatan kerja laki-laki usia 30-59 tahun berpartisipasi di pasar kerja. Sedangkan angkatan kerja perempuan yang berpartisipasi di pasar kerja tertinggi pada kelompok umur 25-34 tahun.

Tingkat partisipasi angkatan kerja total tertinggi pada kelompok umur 30-34 tahun yakni 68,66 persen atau 68,66 persen angkatan kerja pada kelompok umur 30-34 tahun aktif berpartisipasi dalam pasar kerja. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja terendah pada kelompok umur 15-19 tahun yakni 5,60 persen. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja golongan umur 15-19 tahun ini diduga mereka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya angkatan kerja berpendidikan tinggi. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Penduduk dan angkatan kerja yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dan penggerak utama pembangunan. Namun jumlah angkatan kerja yang besar tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan akan menyebabkan banyaknya pengangguran dan pada gilirannya akan menambah permasalahan sosial lainnya.

Disamping itu, Tabel 4.15 juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja usia 60-64 tahun masih tinggi terutama pada Laki-laki yaitu 86,69 persen. Dengan demikian perlu suatu upaya perencanaan bagaimana menampung lansia yang masih produktif dalam pasar kerja. Hal ini perlu mengingat bahwa peningkatan jumlah lansia akan terus terjadi dimasa masa mendatang, sementara jumlah angkatan kerja produktif juga semakin meningkat.

Secara keseluruhan, pola partisipasi angkatan kerja menurut umur ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada gambar 4.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jauh berada di bawah TPak laki-laki sejak usia 20 tahun.

Jika digambarkan secara keseluruhan, pola partisipasi angkatan kerja menurut umur ini, seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut ini.



Pola tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berbentuk seperti huruf **U** terbalik, terlihat pula bahwa semua angkatan kerja laki-laki usia 20 tahun ke atas tetap berada di pasar kerja.

Selanjutnya angkatan kerja yang bekerja atau seseorang yang melakukan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau membantu menghasilkan upah, gaji, pendapatan atau penghasilan atau didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah sehingga diperhitungkan dalam penghitungan sistem neraca nasional.

Tabel 4.15 di atas juga menggambarkan angka penyerapan angkatan kerja dimana persentase angkatan kerja yang bekerja Kota Cimahi cukup tinggi (89,40%) ini membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Kota Cimahi menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja.

Penyerapan angkatan kerja tertinggi pada kelompok umur 30 tahun ke atas. Penyerapan angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Penyerapan angkatan kerja laki-laki tertinggi pada kelompok umur 30 tahun ke atas dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun. Sedangkan penyerapan angkatan kerja perempuan tertinggi pada kelompok 30-59 tahun dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun. Angkatan kerja kelompok usia 15-19 tahun 18,41 persennya bekerja dan diduga kualitas mereka cukup rendah baik dari sisi pendidikan formalnya maupun dari keterampilannya.

Selanjutnya jenis pekerjaan yang banyak digeluti penduduk Kota Cimahi pada tahun 2017, digambarkan pada table 4.16 di bawah ini.

TABEL. 4.16
JUMLAH ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN,
KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
AGGOTA DPRD KAB/KOTA	20	0,015 %	6	0,013 %	26	0,014 %
AKUNTAN	9	0,007 %	11	0,024 %	20	0,011 %
ANGGOTA BPK	1	0,001 %			1	0,001 %
ANGGOTA DPR RI	2	0,001 %			2	0,001 %
ANGGOTA DPRD PROV			1	0,002 %	1	0,001 %
ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	1	0,001 %		0,000 %	1	0,001 %
APOTEKER	16	0,012 %	73	0,156 %	89	0,049 %
ARSITEK	57	0,042 %	21	0,045 %	78	0,043 %
BIARAWATI			8	0,017 %	8	0,004 %
BIDAN			270	0,579 %	270	0,147 %
BURUH HARIAN LEPAS	24.086	17,615 %	1.418	3,039 %	25.504	13,907 %
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	14	0,010 %	1	0,002 %	15	0,008 %
BURUH PETERNAKAN	48	0,035 %	32	0,069 %	80	0,044 %
BURUH TANI/PERKEBUNAN	381	0,279 %	43	0,092 %	424	0,231 %
DOKTER	214	0,157 %	347	0,744 %	561	0,306 %
DOSEN	445	0,325 %	359	0,769 %	804	0,438 %
GURU	974	0,712 %	2.659	5,699 %	3.633	1,981 %
IMAM MASJID	15	0,011 %			15	0,008 %
INDUSTRI	457	0,334 %	286	0,613 %	743	0,405 %
JURU MASAK	25	0,018 %	8	0,017 %	33	0,018 %
KARYAWAN BUMD	216	0,158 %	131	0,281 %	347	0,189 %
KARYAWAN BUMN	2.458	1,798 %	758	1,625 %	3.216	1,754 %
KARYAWAN HONORER	1.024	0,749 %	742	1,590 %	1.766	0,963 %
KARYAWAN SWASTA	61.490	44,970 %	27.927	59,859 %	89.417	48,757 %
KEPALA DESA	8	0,006 %	3	0,006 %	11	0,006 %
KEPOLISIAN RI/POLRI	901	0,659 %	85	0,182 %	986	0,538 %
KONSTRUKSI	127	0,093 %	9	0,019 %	136	0,074 %
KONSULTAN	154	0,113 %	31	0,066 %	185	0,101 %
LAINNYA	72	0,053 %	42	0,090 %	114	0,062 %
MEKANIK	246	0,180 %			246	0,134 %
NELAYAN/PERIKANAN	8	0,006 %	1	0,002 %	9	0,005 %
NOTARIS	12	0,009 %	28	0,060 %	40	0,022 %
PARAJI	1	0,001 %	3	0,006 %	4	0,002 %
PARANORMAL	1	0,001 %	1	0,002 %	2	0,001 %
PASTOR	2	0,001 %		0,000 %	2	0,001 %
PEDAGANG	3.206	2,345 %	706	1,513 %	3.912	2,133 %
PEGAWAI NEGERI SIPIL/PNS	5.204	3,806 %	4.641	9,947 %	9.845	5,368 %
PELAUT	44	0,032 %	1	0,002 %	45	0,025 %
PEMBANTU RUMAH TANGGA	10	0,007 %	264	0,566 %	274	0,149 %
PENATA BUSANA	3	0,002 %	5	0,011 %	8	0,004 %
PENATA RAMBUT	11	0,008 %	32	0,069 %	43	0,023 %

JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
PENATA RIAS	9	0,007 %	54	0,116 %	63	0,034 %
PENDETA	63	0,046 %	14	0,030 %	77	0,042 %
PENELITI	11	0,008 %	11	0,024 %	22	0,012 %
PENGACARA	57	0,042 %	13	0,028 %	70	0,038 %
PENTERJEMAH	2	0,001 %	9	0,019 %	11	0,006 %
PENYIAR RADIO	3	0,002 %	6	0,013 %	9	0,005 %
PERANCANG BUSANA	1	0,001 %	8	0,017 %	9	0,005 %
PERAWAT	108	0,079 %	510	1,093 %	618	0,337 %
PERDAGANGAN	2.743	2,006 %	590	1,265 %	3.333	1,817 %
PETANI/PEKEBUN	279	0,204 %	42	0,090 %	321	0,175 %
PETERNAK	26	0,019 %	7	0,015 %	33	0,018 %
PIALANG	9	0,007 %	1	0,002 %	10	0,005 %
PILOT	8	0,006 %		0,000 %	8	0,004 %
PROMOTOR ACARA	1	0,001 %		0,000 %	1	0,001 %
PSIKIATER/PSIKOLOG	4	0,003 %	19	0,041 %	23	0,013 %
SENIMAN	163	0,119 %	30	0,064 %	193	0,105 %
SOPIR	1.415	1,035 %	3	0,006 %	1.418	0,773 %
TABIB	10	0,007 %	1	0,002 %	11	0,006 %
TENTARA NASIONAL INDONESIA/TNI	3.754	2,745 %	191	0,409 %	3.945	2,151 %
TIDAK/BELUM BEKERJA	9	0,007 %	6	0,013 %	15	0,008 %
TRANSPORTASI	318	0,233 %	8	0,017 %	326	0,178 %
TUKANG		0,000 %	1	0,002 %	1	0,001 %
TUKANG	1	0,001 %		0,000 %	1	0,001 %
TUKANG BATU	60	0,044 %	5	0,011 %	65	0,035 %
TUKANG CUKUR	39	0,029 %	1	0,002 %	40	0,022 %
TUKANG GIGI	3	0,002 %	1	0,002 %	4	0,002 %
TUKANG JAHIT	233	0,170 %	93	0,199 %	326	0,178 %
TUKANG KAYU	203	0,148 %	1	0,002 %	204	0,111 %
TUKANG LAS/PANDAI BESI	64	0,047 %	1	0,002 %	65	0,035 %
TUKANG LISTRIK	51	0,037 %	2	0,004 %	53	0,029 %
TUKANG SOL SEPATU	19	0,014 %	2	0,004 %	21	0,011 %
USTADZ/MUBALIGH	131	0,096 %	7	0,015 %	138	0,075 %
WAKIL WALIKOTA	1	0,001 %			1	0,001 %
WALIKOTA	1	0,001 %			1	0,001 %
WARTAWAN	59	0,043 %	8	0,017 %	67	0,037 %
WIRASWASTA	24.916	18,222 %	4.057	8,696 %	28.973	15,798 %
KOTA CIMAHI	136.737	100,00 %	46.655	100,00 %	183.392	100,00 %
		70,65 %		24,45 %		47,71 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari Tabel 4.16 terlihat bahwa hampir separuh (47,71%) penduduk usia 15-64 tahun yang tinggal di Kota Cimahi berkerja.

Jenis pekerjaan yang terbanyak digeluti oleh penduduk usia 15-64 tahun adalah sebagai Karyawan Swasta (48,757%), diikuti Wiraswasta sebesar 15,798 persen, dan Buruh Harian Lepas sebesar 13,907 persen. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan paling banyak berprofesi sebagai karyawan swasta. Sementara yang menjadi wiraswasta didominasi angkatan kerja laki-laki, hal yang sama dengan pekerjaan buruh harian lepas.

Dari tabel 4.16 di atas terlihat pula bahwa sektor swasta banyak memberikan peluang kerja dan merupakan pilihan utama bagi penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

3. Pengangguran (Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja) dan Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja atau terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja dengan kata lain tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta atau banyaknya tenaga kerja asing yang dengan mudah memasuki pasar kerja yang tidak terkendali.

Adapun tingkat pengangguran mempunyai beberapa karakteristik yakni pengangguran menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, menurut pendidikan yang ditamatkan dan menurut wilayah.

Sebagaimana tabel 4.17 yang menunjukkan jumlah dan proporsi angkatan kerja yang menganggur atau penduduk yang belum/tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan menurut pengelompokan umur lima tahunan. Dari tabel 4.17 terlihat pula bahwa pengangguran didominasi oleh kelompok umur muda yakni 20-34 tahun. Diantara kelompok umur tersebut, kelompok umur 20-24 tahun yang paling persentasenya. Dari 205.129 orang angkatan kerja di Kota Cimahi, 183.392 orang bekerja dan 21.737 orang (10,60%) menganggur (Belum/Tidak Bekerja).

TABEL. 4.17
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA YANG BELUM/TIDAK BEKERJA DAN TINGKAT
PENGANGGURAN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA YANG TIDAK/BELUM BEKERJA						TINGKAT PENGANGGURAN		
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		L	P	L+P
	n	%	n	%	n	%			
15-19	1.170	8,55 %	948	11,77 %	2.118	9,74 %	81,70	81,44	81,59
20-24	4.157	30,38 %	2.713	33,68 %	6.870	31,61 %	43,67	43,80	43,72
25-29	2.819	20,60 %	1.420	17,63 %	4.239	19,50 %	16,61	16,65	16,62
30-34	1.637	11,97 %	739	9,17 %	2.376	10,93 %	7,90	8,81	8,16
35-39	1.129	8,25 %	509	6,32 %	1.638	7,54 %	4,70	5,88	5,01
40-44	695	5,08 %	420	5,21 %	1.115	5,13 %	3,15	5,96	3,83
45-49	573	4,19 %	405	5,03 %	978	4,50 %	2,85	7,02	3,78
50-54	479	3,50 %	306	3,80 %	785	3,61 %	3,07	7,12	3,94
55-59	467	3,41 %	288	3,58 %	755	3,47 %	3,85	9,33	4,97
60-64	556	4,06 %	307	3,81 %	863	3,97 %	7,09	19,52	9,16
KOTA CIMAHI	13.682	100,00 %	8.055	100,00 %	21.737	100,00 %	9,10	14,72	10,60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tingkat pengangguran di Kota Cimahi tertinggi pada kelompok umur 15-19 tahun yakni 81,59 persen atau dari 2.596 orang angkatan kerja usia 15-19 tahun 2.118 orang tidak bekerja/mencari pekerjaan/baru mulai akan bekerja. Selanjutnya tingkat pengangguran kedua tertinggi pada kelompok umur 20-24 tahun yakni 43,72 persen, diikuti kelompok umur 25-29 tahun yakni 16,62 persen. Sedangkan kelompok umur dengan angka pengangguran terendah pada kelompok umur 45-49 tahun. yakni 3,78 persen.

Pengangguran pada kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan atau putus sekolah sehingga terpaksa harus mencari pekerjaan pada umur sekolah dan seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah dan belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cimahi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan.

Latar belakang mengapa kelompok usia muda itu ikut terjun ke pasar kerja, antara lain diduga kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja. Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah penganggur menjadi lebih banyak lagi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal ketrampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja.

Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Persebaran penduduk yang belum/tidak bekerja (pengangguran) menurut wilayah kecamatan ditampilkan dalam tabel 4.18 di bawah ini.

TABEL. 4.18
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA YANG BELUM/TIDAK BEKERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	ANGKATAN KERJA YANG TIDAK/BELUM BEKERJA						TINGKAT PENGANGGURAN		
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		L	P	L+P
	n	%	n	%	n	%			
CIMAHI SELATAN	6.069	44,36 %	3.636	45,14 %	9.705	44,65 %	9,57	15,62	11,19
KEL. CIBEBER	757	5,53 %	365	4,53 %	1.122	5,16 %	10,15	16,38	11,59
KEL. CIBEUREUM	1.423	10,40 %	1.019	12,65 %	2.442	11,23 %	8,38	16,15	10,48
KEL. LEUWIGAJAH	1.173	8,57 %	661	8,21 %	1.834	8,44 %	9,77	15,06	11,19
KEL. MELONG	1.546	11,30 %	976	12,12 %	2.522	11,60 %	8,98	14,53	10,54
KEL. UTAMA	1.170	8,55 %	615	7,64 %	1.785	8,21 %	11,96	16,93	13,31
CIMAHI TENGAH	4.402	32,17 %	2.373	29,46 %	6.775	31,17 %	10,00	14,26	11,17
KEL. BAROS	623	4,55 %	286	3,55 %	909	4,18 %	10,71	11,46	10,94
KEL. CIGUGUR TENGAH	1.233	9,01 %	719	8,93 %	1.952	8,98 %	9,21	13,69	10,47
KEL. CIMAHI	403	2,95 %	192	2,38 %	595	2,74 %	11,21	14,79	12,16
KEL. KARANGMEKAR	421	3,08 %	240	2,98 %	661	3,04 %	9,53	13,64	10,70
KEL. PADASUKA	958	7,00 %	550	6,83 %	1.508	6,94 %	9,12	14,94	10,63
KEL. SETIAMANAH	764	5,58 %	386	4,79 %	1.150	5,29 %	12,13	17,90	13,60
CIMAHI UTARA	3.211	23,47 %	2.046	25,40 %	5.257	24,18 %	7,47	13,84	9,10
KEL. CIBABAT	1.134	8,29 %	680	8,44 %	1.814	8,35 %	7,75	12,98	9,13
KEL. CIPAGERAN	918	6,71 %	581	7,21 %	1.499	6,90 %	7,11	14,12	8,81
KEL. CITEUREUP	807	5,90 %	549	6,82 %	1.356	6,24 %	7,77	15,43	9,72
KEL. PASIRKALIKI	352	2,57 %	236	2,93 %	588	2,71 %	6,99	12,57	8,50
KOTA CIMAHI	13.682	100,00 %	8.055	100,00 %	21.737	100,00 %	9,10	14,72	10,60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika dilihat menurut kecamatan, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu 11,19 persen, diikuti Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 11,17 persen. Sedangkan Kecamatan Cimahi Utara merupakan kecamatan dengan persentase pengangguran atau belum/tidak bekerja atau sedang mencari kerja terendah yaitu 9,10 persen.

Selanjutnya pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja yang belum/tidak bekerja (pengangguran) ini disajikan dalam tabel 4.19.

TABEL. 4.19
JUMLAH DAN PROPORSI ANGKATAN KERJA YANG BELUM/TIDAK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	ANGKATAN KERJA YANG TIDAK/BELUM BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK SEKOLAH	641	4,68 %	517	6,42 %	1.158	5,33 %
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	487	3,56 %	325	4,03 %	812	3,74 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	2.034	14,87 %	1.135	14,09 %	3.169	14,58 %
SLTP/SEDERAJAT	3.585	26,20 %	1.746	21,68 %	5.331	24,53 %
SLTA/SEDERAJAT	6.126	44,77 %	3.560	44,20 %	9.686	44,56 %
DIPLOMA I/II	113	0,83 %	110	1,37 %	223	1,03 %
AKADEMI/D-III/S MUDA	256	1,87 %	233	2,89 %	489	2,25 %
DIPLOMA IV/STRATA I	423	3,09 %	408	5,07 %	831	3,82 %
STRATA II	15	0,11 %	20	0,25 %	35	0,16 %
STRATA III	2	0,01 %	1	0,01 %	3	0,01 %
KOTA CIMAH	13.682	100,00 %	8.055	100,00 %	21.737	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 4.19 terlihat bahwa mayoritas pengangguran di Kota Cimahi berpendidikan tamat SLTA/Sederajat yaitu 44,56 persen, diikuti tamat SLTP/Sederajat 24,53 persen, dan tamat SD/Sederajat 14,58 persen. Sedangkan yang tamat pendidikan tinggi (D-I/D-II/D-III/Akademi/S1/S2/S3) sebesar 7,27 persen dan yang berpendidikan rendah (tidak tamat SD/Sederajat dan tidak sekolah) sebesar 9,07 persen.

C. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain

sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tahun 2017 jumlah keluarga di Kota Cimahi sebanyak 162.264 keluarga yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Cimahi Selatan memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 68.168 keluarga, kemudian disusul oleh Kecamatan Cimahi Tengah sebanyak 48.026 keluarga dan Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 46.068 keluarga.

TABEL. 4.20
JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KELUARGA, DAN RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA
KELUARGA, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KELUARGA		RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA
	n	%	n	%	
CIMAH SELATAN	226.167	42,22 %	68.168	42,01 %	3
KEL. CIBEBER	26.662	4,98 %	8.083	4,98 %	3
KEL. CIBEUREUM	59.569	11,12 %	17.833	10,99 %	3
KEL. LEUWIGAJAH	43.546	8,13 %	13.100	8,07 %	3
KEL. MELONG	62.604	11,69 %	18.574	11,45 %	3
KEL. UTAMA	33.786	6,31 %	10.578	6,52 %	3
CIMAH TENGAH	155.610	29,05 %	48.026	29,60 %	3
KEL. BAROS	20.141	3,76 %	6.518	4,02 %	3
KEL. CIGUGUR TENGAH	46.131	8,61 %	13.974	8,61 %	3
KEL. CIMAH	12.692	2,37 %	4.068	2,51 %	3
KEL. KARANGMEKAR	15.937	2,98 %	5.013	3,09 %	3
KEL. PADASUKA	38.065	7,11 %	11.561	7,12 %	3
KEL. SETIAMANAH	22.644	4,23 %	6.892	4,25 %	3
CIMAH UTARA	153.908	28,73 %	46.068	28,39 %	3
KEL. CIBABAT	52.274	9,76 %	15.611	9,62 %	3
KEL. CIPAGERAN	46.494	8,68 %	13.818	8,52 %	3
KEL. CITEUREUP	37.044	6,92 %	11.185	6,89 %	3
KEL. PASIRKALIKI	18.096	3,38 %	5.454	3,36 %	3
KOTA CIMAH	535.685	100,00 %	162.262	100,00 %	3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Cimahi sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Cimahi lebih banyak merupakan keluarga inti. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 3 orang per keluarga. hal yang sama untuk setiap kelurahan.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kota Cimahi dan dapat digunakan Pemerintah Kota Cimahi dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3 orang dan kebutuhan pangan.

2. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

TABEL. 4.21
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT STATUS HUBUNGAN KELUARGA DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

STATUS HUBUNGAN KELUARGA	LAKI-LAKI		PENDUDUK PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
KEPALA KELUARGA	137.152	50,75 %	25.110	9,46 %	162.262	30,29 %
SUAMI	7	0,003 %			7	0,001 %
ISTERI			125.048	47,11 %	125.048	23,34 %
ANAK	125.447	46,42 %	106.942	40,29 %	232.389	43,38 %
MENANTU	78	0,03 %	84	0,03 %	162	0,03 %
CUCU	2.245	0,83 %	1.791	0,67 %	4.036	0,75 %
ORANG TUA	163	0,06 %	1.242	0,47 %	1.405	0,26 %
MERTUA	113	0,04 %	1.112	0,42 %	1.225	0,23 %
FAMILI LAIN	4.888	1,81 %	3.855	1,45 %	8.743	1,63 %
ASISTEN RT	13	0,005 %	78	0,03 %	91	0,02 %
LAINNYA	158	0,06 %	159	0,06 %	317	0,06 %
KOTA CIMAHI	270.264	100,00 %	265.421	100,00 %	535.685	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari Tabel 4.21 nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yaitu dari 137.152 kepala keluarga laki-laki (50,75%) yang mempunyai isteri sebanyak 125.048 orang (47,11%), sedangkan dari 25.110 kepala keluarga perempuan (9,46%) hanya 7 orang (0,003%) saja yang mempunyai suami. Hal ini menunjukkan bahwa diduga kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup

maupun cerai mati atau perempuan yang menjadi kepala keluarga ini berstatus kawin tetapi suaminya bekerja di luar Kota Cimahi dan untuk waktu yang lama atau mereka menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena diduga keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, asisten rumah tangga/pembantu dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 2,98 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kota Cimahi jumlahnya tidak besar. Namun demikian, perlu diperhatikan adalah keluarga luas yang dikepalai oleh perempuan, proporsinya lebih besar dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki (3,13% V 2,83%), hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah anggota keluarga bukan inti (menantu, cucu, orangtua, mertua, family lain, lainnya) terhadap jumlah kepala keluarganya. Walaupun demikian dari keluarga bukan inti, proporsi terbesar adalah family lain. Dapat diasumsikan bahwa Kota Cimahi sebagai bagian dari kawasan Bandung Raya dan merupakan penyangga Kota Bandung, Kota Cimahi mempunyai banyak daya tarik dan kemudahan, khususnya dalam bidang pekerjaan dan pendidikan. Oleh karena itu banyak dari keluarga bukan inti dalam hal ini family lain yang ikut menetap di Kota Cimahi.

3. Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, persebarannya, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Dilihat dari persebarannya, tabel 4.22 menyajikan jumlah dan proporsi kepala keluarga kota cimahi tahun 2017 menurut kecamatan, kelurahan dan jenis kelamin. Dari tabel 4.22 juga terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Cimahi adalah laki-laki yaitu 137.152 orang (84,53%), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 25.110 orang (15,47%) atau dengan perbandingannya sekitar 5:1, yang artinya dari 5 (lima) kepala keluarga laki-laki terdapat 1 (satu) kepala keluarga perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sekaligus

sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai hidup, cerai mati, atau sebab-sebab yang lain.

TABEL. 4.22
JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN, DAN
JENIS KELAMIN KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	LAKI-LAKI		KEPALA KELUARGA PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
CIMAH SELATAN	58.118	42,37 %	10.050	40,02 %	68.168	42,01 %
KEL. CIBEBER	6.942	5,06 %	1.141	4,54 %	8.083	4,98 %
KEL. CIBEUREUM	15.309	11,16 %	2.524	10,05 %	17.833	10,99 %
KEL. LEUWIGAJAH	11.106	8,10 %	1.994	7,94 %	13.100	8,07 %
KEL. MELONG	15.777	11,50 %	2.797	11,14 %	18.574	11,45 %
KEL. UTAMA	8.984	6,55 %	1.594	6,35 %	10.578	6,52 %
CIMAH TENGAH	39.925	29,11 %	8.101	32,26 %	48.026	29,60 %
KEL. BAROS	5.306	3,87 %	1.212	4,83 %	6.518	4,02 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	11.968	8,73 %	2.006	7,99 %	13.974	8,61 %
KEL. CIMAH	3.183	2,32 %	885	3,52 %	4.068	2,51 %
KEL. KARANGMEKAR	4.028	2,94 %	985	3,92 %	5.013	3,09 %
KEL. PADASUKA	9.751	7,11 %	1.810	7,21 %	11.561	7,12 %
KEL. SETIAMANAH	5.689	4,15 %	1.203	4,79 %	6.892	4,25 %
CIMAH UTARA	39.109	28,52 %	6.959	27,71 %	46.068	28,39 %
KEL. CIBABAT	13.158	9,59 %	2.453	9,77 %	15.611	9,62 %
KEL. CIPAGERAN	11.840	8,63 %	1.978	7,88 %	13.818	8,52 %
KEL. CITEUREUP	9.470	6,90 %	1.715	6,83 %	11.185	6,89 %
KEL. PASIRKALIKI	4.641	3,38 %	813	3,24 %	5.454	3,36 %
KOTA CIMAH	137.152	100,00 %	25.110	100,00 %	162.262	100,00 %
		84,53%		15,47%		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dilihat berdasarkan wilayah, proporsi kepala keluarga perempuan terbesar terlihat pada wilayah Kecamatan Cimahi Selatan (42,01%) terutama di Kelurahan Melong (11,45%) dan Kelurahan Cibeureum (10,99%).

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Selain itu, peningkatan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang.

Selanjutnya jika dilihat menurut kelompok umur, maka tabel 4.23 menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di Kota Cimahi dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-54 tahun. Ini menunjukkan

bahwa Kota Cimahi merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

TABEL. 4.23
JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		KEPALA KELUARGA PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15-19	95	0,07 %	97	0,39 %	192	0,12 %
20-24	2.498	1,82 %	559	2,23 %	3.057	1,88 %
25-29	9.939	7,25 %	1.007	4,01 %	10.946	6,75 %
30-34	15.953	11,63 %	1.317	5,24 %	17.270	10,64 %
35-39	20.965	15,29 %	1.784	7,10 %	22.749	14,02 %
40-44	20.323	14,82 %	2.153	8,57 %	22.476	13,85 %
45-49	19.209	14,01 %	2.562	10,20 %	21.771	13,42 %
50-54	15.181	11,07 %	2.779	11,07 %	17.960	11,07 %
55-59	12.276	8,95 %	3.009	11,98 %	15.285	9,42 %
60-64	8.896	6,49 %	2.890	11,51 %	11.786	7,26 %
65-69	5.372	3,92 %	2.414	9,61 %	7.786	4,80 %
70-74	3.002	2,19 %	1.910	7,61 %	4.912	3,03 %
≥75	3.443	2,51 %	2.629	10,47 %	6.072	3,74 %
KOTA CIMAH	137.152	100,00 %	25.110	100,00 %	162.262	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Apabila dikaitkan dengan jenis kelamin, tabel 4.23 juga menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga laki-laki berada di kelompok umur 30-54 tahun, sedangkan proporsi kepala keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 45-64 tahun dan 75 tahun ke atas. Penduduk perempuan menjadi kepala keluarga diduga sebagian besar karena mereka selain belum menikah, juga karena cerai hidup ataupun cerai mati.

Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah adanya kepala keluarga berumur 75 tahun ke atas yaitu sebesar 3,74 persen, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kota Cimahi.

Selanjutnya akan lebih menarik jika kepala keluarga ini dikaitkan dengan status perkawinannya.

TABEL. 4.24
JUMLAH DAN PROPORSI KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS KAWIN, DAN JENIS
KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		KEPALA KELUARGA PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
BELUM KAWIN	3.624	2,64 %	2.250	8,96 %	5.874	3,62 %
KAWIN	128.942	94,01 %	4.609	18,36 %	133.551	82,31 %
CERAI HIDUP	2.086	1,52 %	5.158	20,54 %	7.244	4,46 %
CERAI MATI	2.500	1,82 %	13.093	52,14 %	15.593	9,61 %
KOTA CIMAH	137.152	100,00 %	25.110	100,00 %	162.262	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari table 4.24 dapat dilihat bahwa 82,31 persen (133.551 orang) kepala keluarga Kota Cimahi berstatus kawin, dimana kepala keluarga laki-laki yang berstatus kawin 94,01 persen dan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin 18,36 persen sementara kepala keluarga yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati atau yang disebut juga dengan keluarga dengan orang tua tunggal berjumlah 22.837 orang atau 14,07 persen terdiri dari laki-laki 3,34 persen (4.586 orang) dan perempuan 72,68 persen (18.251 orang). Sementara sisanya 3,62 persen adalah kepala keluarga yang berstatus belum kawin terdiri dari laki-laki 2,64 persen dan perempuan 8,96 persen.

Besarnya proporsi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin dan rendahnya proporsi berstatus cerai hidup dan cerai mati, diduga kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut.

Sementara perempuan yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati, mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggungjawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor lainnya kemungkinan kepala keluarga perempuan tersebut yang berstatus cerai mati terjadi pada kelompok umur yang lebih tua yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Jika dikaitkan dengan tabel 4.21 bahwa kepala keluarga perempuan yang mempunyai suami sebanyak 7 orang, sedangkan dari tabel 4.24 terlihat bahwa jumlah kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin sebesar 4.609 orang (18,36%), diduga mereka berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat dan seterusnya karena di dalam administrasi kependudukan mereka mempunyai kartu keluarga sendiri atau diduga mereka tidak tinggal bersama suaminya, karena suaminya bekerja di luar kota dan masih menjadi penduduk Kota Cimahi atau suaminya bekerja jauh di luar kota dan menjadi penduduk kota tersebut atau bekerja di luar negeri untuk waktu yang lama.

Sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.23 di atas bahwa lebih dari separuh kepala keluarga (63%) Kota Cimahi berada pada kelompok usia 30-54 tahun atau usia produktif

Lebih menarik jika kepala keluarga berstatus kawin ini dikaitkan dengan kelompok umur sebagaimana tabel 4.25 di bawah ini dimana tabel 4.25 ini menyajikan gambaran lengkap mengenai struktur umur Kepala Keluarga di Kota Cimahi menurut pengelompokan umur lima tahunan, status kawin, dan jenis kelamin.

TABEL. 4.25
JUMLAH DAN PROPORSI KEPALA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR,
STATUS KAWIN, DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN	STATUS KAWIN KEPALA KELUARGA							
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
	n	%	n	%	n	%	n	%
LAKI-LAKI	3.624	61,70 %	128.942	96,55 %	2.086	28,80 %	2.500	16,03 %
15-19	81	1,38 %	14	0,01 %		0,00 %		0,00 %
20-24	609	10,37 %	1.882	1,41 %	7	0,10 %		0,00 %
25-29	776	13,21 %	9.106	6,82 %	46	0,64 %	11	0,07 %
30-34	658	11,20 %	15.088	11,30 %	171	2,36 %	36	0,23 %
35-39	478	8,14 %	20.100	15,05 %	307	4,24 %	80	0,51 %
40-44	344	5,86 %	19.497	14,60 %	386	5,33 %	96	0,62 %
45-49	252	4,29 %	18.396	13,77 %	380	5,25 %	181	1,16 %
50-54	173	2,95 %	14.469	10,83 %	307	4,24 %	232	1,49 %
55-59	97	1,65 %	11.676	8,74 %	213	2,94 %	290	1,86 %
60-64	84	1,43 %	8.287	6,21 %	144	1,99 %	381	2,44 %
65-69	43	0,73 %	4.924	3,69 %	61	0,84 %	344	2,21 %
70-74	15	0,26 %	2.692	2,02 %	32	0,44 %	263	1,69 %
≥75	14	0,24 %	2.811	2,10 %	32	0,44 %	586	3,76 %
PEREMPUAN	2.250	38,30 %	4.609	3,45 %	5.158	71,20 %	13.093	83,97 %
15-19	81	1,38 %	11	0,01 %	3	0,04 %	2	0,01 %
20-24	369	6,28 %	116	0,09 %	65	0,90 %	9	0,06 %
25-29	407	6,93 %	337	0,25 %	220	3,04 %	43	0,28 %
30-34	304	5,18 %	475	0,36 %	438	6,05 %	100	0,64 %
35-39	217	3,69 %	623	0,47 %	664	9,17 %	280	1,80 %
40-44	212	3,61 %	630	0,47 %	816	11,26 %	495	3,17 %
45-49	200	3,40 %	575	0,43 %	849	11,72 %	938	6,02 %
50-54	156	2,66 %	499	0,37 %	771	10,64 %	1.353	8,68 %
55-59	107	1,82 %	394	0,30 %	573	7,91 %	1.935	12,41 %
60-64	92	1,57 %	343	0,26 %	398	5,49 %	2.057	13,19 %
65-69	51	0,87 %	238	0,18 %	179	2,47 %	1.946	12,48 %
70-74	24	0,41 %	192	0,14 %	98	1,35 %	1.596	10,24 %
≥75	30	0,51 %	176	0,13 %	84	1,16 %	2.339	15,00 %
KOTA CIMAHI (L+P)	5.874	100,00 %	133.551	100,00 %	7.244	100,00 %	15.593	100,00 %
15-19	162	2,76 %	25	0,02 %	3	0,04 %	2	0,01 %
20-24	978	16,65 %	1.998	1,50 %	72	0,99 %	9	0,06 %
25-29	1.183	20,14 %	9.443	7,07 %	266	3,67 %	54	0,35 %
30-34	962	16,38 %	15.563	11,65 %	609	8,41 %	136	0,87 %
35-39	695	11,83 %	20.723	15,52 %	971	13,40 %	360	2,31 %
40-44	556	9,47 %	20.127	15,07 %	1.202	16,59 %	591	3,79 %
45-49	452	7,69 %	18.971	14,21 %	1.229	16,97 %	1.119	7,18 %
50-54	329	5,60 %	14.968	11,21 %	1.078	14,88 %	1.585	10,16 %
55-59	204	3,47 %	12.070	9,04 %	786	10,85 %	2.225	14,27 %
60-64	176	3,00 %	8.630	6,46 %	542	7,48 %	2.438	15,64 %
65-69	94	1,60 %	5.162	3,87 %	240	3,31 %	2.290	14,69 %
70-74	39	0,66 %	2.884	2,16 %	130	1,79 %	1.859	11,92 %
≥75	44	0,75 %	2.987	2,24 %	116	1,60 %	2.925	18,76 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel 4.25 tampak bahwa persentase kepala keluarga berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 30-54 tahun, kepala keluarga berstatus belum kawin tertinggi berada pada kelompok 20-39 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 35-59 tahun, dan kepala keluarga yang berstatus cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

Tabel 4.25 juga menggambarkan proporsi tertinggi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin berada pada kelompok umur 30-54 tahun dan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 35-49 tahun. Kepala keluarga laki-laki berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 35-54 tahun, sedangkan kepala keluarga perempuan berstatus cerai hidup berada pada kelompok umur 40-54 tahun dan kepala keluarga laki-laki berstatus cerai mati berada pada kelompok umur 45 tahun ke atas, sedangkan kepala keluarga perempuan berstatus cerai mati pada kelompok 55 tahun ke atas.

Keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan karena berstatus cerai hidup atau cerai mati perlu mendapat perhatian lebih lanjut, karena biasanya mempunyai status ekonomi yang rendah, hal ini diduga bahwa kepala keluarga perempuan berusia lanjut, biasanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga rendah. Untuk itu kebutuhan pemberdayaan terhadap keluarga-keluarga tersebut perlu perhatian khusus, apakah anggota keluarganya berstatus bekerja atau tidak bekerja.

Dalam hal intervensi kemiskinan, data keluarga ini juga sangat dibutuhkan karena kemiskinan individu berasal dari kemiskinan keluarga. Oleh sebab itu untuk menangani kemiskinan, unit yang harus diperhatikan adalah unit keluarga atau dengan kata lain melakukan pemberdayaan keluarga, dimana seluruh potensi anggota keluarga harus ditingkatkan.

Kota Cimahi walaupun termasuk wilayah perkotaan namun masih ditemui penduduk yang menikah di usia muda (di bawah 20 tahun) sebanyak 25 orang (0,02%).

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Bab 2 pasal 6 ayat 2 berbunyi "*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*" walaupun diperbolehkan perkawinan muda sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*".

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum*

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan". Sementara itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan batasan anak adalah di bawah usia 18 tahun,

Pasal-pasal pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (*catin*), yakni *jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah*, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 *"Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua"*. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali.

Secara ilmu pengetahuan bahwa perkawinan usia muda (15-19 tahun) khususnya bagi perempuan akan berdampak negatif:

- a. pada kesehatan karena pada usia remaja ini perkembangan saluran rahim memang belum benar-benar sempurna sehingga akan berbahaya ketika melahirkan.
- b. terhadap pola pengasuhan anak karena dalam mengasuh anak diperlukan sikap kedewasaan, dan kesabaran ekstra dari seorang ibu dan diperlukan pula pendidikan yang cukup pada ibu, agar kelak anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas.
- c. rentan dilanda perceraian karena karena belum adanya kesiapan dari masing-masing pihak dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, hingga masalah psikologis dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pemerintah Kota Cimahi memberikan informasi dan pemahaman kepada penduduk usia muda (remaja) tentang pentingnya menunda perkawinan dalam rangka pembentukan dan peningkatan keluarga yang sejahtera dan berkualitas, serta sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian dikalangan keluarga usia muda.

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang ditamatkan, karena pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi

pendidikan yang ditamatkan oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.

TABEL. 4.26
JUMLAH DAN PROPORSI KEPALA KELUARGA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	137	0,10 %	156	0,62 %	293	0,18 %
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.060	0,77 %	632	2,52 %	1.692	1,04 %
TAMAT SD/SEDERAJAT	23.174	16,90 %	8.141	32,42 %	31.315	19,30 %
SLTP/SEDERAJAT	26.559	19,36 %	5.256	20,93 %	31.815	19,61 %
SLTA/SEDERAJAT	60.247	43,93 %	7.834	31,20 %	68.081	41,96 %
DIPLOMA I/II	1.952	1,42 %	488	1,94 %	2.440	1,50 %
AKADEMI/D-III/S MUDA	7.225	5,27 %	993	3,95 %	8.218	5,06 %
DIPLOMA IV/STRATA I	14.222	10,37 %	1.425	5,68 %	15.647	9,64 %
STRATA II	2.252	1,64 %	167	0,67 %	2.419	1,49 %
STRATA III	324	0,24 %	18	0,07 %	342	0,21 %
KOTA CIMAH	137.152	100,00 %	25.110	100,00 %	162.262	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga (41,96%) kepala keluarga di Kota Cimahi tamat SLTA/ sederajat, tamat SLTP/ sederajat 19,61 persen, tamat SD/ Sederajat 19,30 persen dan kepala keluarga yang menamatkan pendidikan Diploma I/II ke atas sebesar 17,90 persen, terdiri dari laki-laki 18,94 persen dan perempuan sebesar 12,31 persen.

Lebih memprihatinkan lagi adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan tidak tamat SD/ Sederajat, dengan pendidikan yang sangat rendah ini diduga mereka tidak mampu bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan di sektor formal karena tingginya persaingan di tengah kemajuan informasi dan teknologi sehingga kebanyakan dari mereka hanya mampu bekerja di sektor informal yang penghasilannya relatif rendah daripada lapangan pekerjaan di sektor formal, hal ini sudah tentu sangat berpengaruh pada kemampuan daya beli dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Melihat kondisi seperti ini dan sebagai kota yang tidak sedikit memiliki sumber daya alam, maka sudah selayaknya Pemerintah Kota Cimahi harus memberikan perhatian lebih serius pada bidang pendidikan, dan juga peningkatan keterampilan bagi kepala keluarga yang berpendidikan rendah agar mereka dapat bersaing di pasar global.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa proporsi kepala keluarga laki-laki yang tamat SLTA/Sederajat (43,93%) lebih tinggi daripada perempuan (31,20%). Sedangkan kepala keluarga laki-laki yang tamat SLTP/ sederajat lebih rendah dibandingkan perempuan (19,36% VS 20,93%), hal yang sama untuk tamat SD/ sederajat (16,90% VS 32,42%). Melihat kondisi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga perempuan, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

TABEL. 4.27
JUMLAH DAN PROPORSI KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA DAN
JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

JENIS KEGIATAN UTAMA	LAKI-LAKI		KEPALA KELUARGA PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
BELUM/TIDAK BEKERJA	4.321	3,15 %	1.595	6,35 %	5.916	3,65 %
BEKERJA	125.986	91,86 %	6.482	25,81 %	132.468	81,64 %
MENGURUS RUMAH TANGGA	31	0,02 %	14.858	59,17 %	14.889	9,18 %
PELAJAR/MAHASISWA	595	0,43 %	415	1,65 %	1.010	0,62 %
PENSIUNAN	6.219	4,53 %	1.760	7,01 %	7.979	4,92 %
KOTA CIMAH	137.152	100,00 %	25.110	100,00 %	162.262	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa 81,64 persen kepala keluarga di Kota Cimahi bekerja. Menarik untuk dicermati adalah keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang belum/tidak bekerja yakni 3,65 persen, dan kepala keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa 0,62 persen, serta kepala keluarga yang mengurus rumah tangga sebesar 9,18 persen. Untuk itu Pemerintah Kota Cimahi perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang belum/tidak bekerja, walaupun proporsi mereka tidak terlalu besar.

Kepala keluarga yang belum/tidak bekerja, dapat disebabkan karena belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang belum/tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah. Karena bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diduga mereka tidak mempunyai penghasilan, sehingga Pemerintah Kota Cimahi perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja (91,86%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (25,81%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga lebih rendah yakni 0,02 persen daripada kepala keluarga perempuan yakni 59,17 persen. Selain itu, terdapat kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 4,92 persen dengan proporsi kepala keluarga laki-laki lebih rendah yakni 4,53 persen dari pada Kepala Keluarga perempuan yakni 7,01 persen.

Selanjutnya kepala keluarga yang bekerja dilihat dari jenis pekerjaan yang digeluti dapat dilihat pada table 4.28 di bawah ini.

TABEL. 4.28

JUMLAH DAN PROPORSI KEPALA KELUARGA YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

JENIS PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
AGGOTA DPRD KAB/KOTA	23	0,018 %	2	0,031 %	25	0,019 %
AKUNTAN	7	0,006 %	1	0,015 %	8	0,006 %
ANGGOTA BPK	1	0,001 %			1	0,001 %
ANGGOTA DPR RI	2	0,002 %			2	0,002 %
ANGGOTA DPRD PROV	1	0,001 %			1	0,001 %
APOTEKER	16	0,013 %	5	0,077 %	21	0,016 %
ARSITEK	56	0,044 %	2	0,031 %	58	0,044 %
BIARAWATI			7	0,108 %	7	0,005 %
BIDAN			20	0,309 %	20	0,015 %
BURUH HARIAN LEPAS	23.262	18,464 %	409	6,310 %	23.671	17,869 %
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	14	0,011 %			14	0,011 %
BURUH PETERNAKAN	21	0,017 %	2	0,031 %	23	0,017 %
BURUH TANI/PERKEBUNAN	518	0,411 %	21	0,324 %	539	0,407 %
DOKTER	194	0,154 %	24	0,370 %	218	0,165 %
DOSEN	455	0,361 %	31	0,478 %	486	0,367 %
GURU	911	0,723 %	282	4,351 %	1.193	0,901 %
IMAM MASJID	20	0,016 %			20	0,015 %
INDUSTRI	405	0,321 %	77	1,188 %	482	0,364 %
JURU MASAK	19	0,015 %	2	0,031 %	21	0,016 %
KARYAWAN BUMD	190	0,151 %	7	0,108 %	197	0,149 %
KARYAWAN BUMN	2.243	1,780 %	60	0,926 %	2.303	1,739 %

JENIS PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
KARYAWAN HONORER	852	0,676 %	68	1,049 %	920	0,695 %
KARYAWAN SWASTA	52.536	41,700 %	2.946	45,449 %	55.482	41,883 %
KEPALA DESA	14	0,011 %			14	0,011 %
KEPOLISIAN RI/POLRI	803	0,637 %	11	0,170 %	814	0,614 %
KONSTRUKSI	133	0,106 %	2	0,031 %	135	0,102 %
KONSULTAN	143	0,114 %	2	0,031 %	145	0,109 %
LAINNYA	53	0,042 %	5	0,077 %	58	0,044 %
MEKANIK	217	0,172 %		0,000 %	217	0,164 %
NELAYAN/PERIKANAN	6	0,005 %		0,000 %	6	0,005 %
NOTARIS	13	0,010 %	4	0,062 %	17	0,013 %
PARAJI	1	0,001 %	8	0,123 %	9	0,007 %
PARANORMAL	1	0,001 %	1	0,015 %	2	0,002 %
PASTOR	1	0,001 %			1	0,001 %
PEDAGANG	3.323	2,638 %	255	3,934 %	3.578	2,701 %
PEGAWAI NEGERI SIPIL/PNS	5.197	4,125 %	667	10,290 %	5.864	4,427 %
PELAUT	39	0,031 %	1	0,015 %	40	0,030 %
PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	0,002 %	109	1,682 %	112	0,085 %
PENATA BUSANA	3	0,002 %	2	0,031 %	5	0,004 %
PENATA RAMBUT	10	0,008 %	9	0,139 %	19	0,014 %
PENATA RIAS	2	0,002 %	15	0,231 %	17	0,013 %
PENDETA	67	0,053 %	4	0,062 %	71	0,054 %
PENELITI	10	0,008 %	2	0,031 %	12	0,009 %
PENGACARA	52	0,041 %	1	0,015 %	53	0,040 %
PENTERJEMAH	5	0,004 %	1	0,015 %	6	0,005 %
PENYIAR RADIO	1	0,001 %			1	0,001 %
PERANCANG BUSANA	2	0,002 %			2	0,002 %
PERAWAT	94	0,075 %	35	0,540 %	129	0,097 %
PERDAGANGAN	2.893	2,296 %	190	2,931 %	3.083	2,327 %
PETANI/PEKEBUN	402	0,319 %	15	0,231 %	417	0,315 %
PETERNAK	24	0,019 %	4	0,062 %	28	0,021 %
PIALANG	7	0,006 %			7	0,005 %
PILOT	6	0,005 %			6	0,005 %
PROMOTOR ACARA	1	0,001 %			1	0,001 %
PSIKIATER/PSIKOLOG	2	0,002 %	1	0,015 %	3	0,002 %
SENIMAN	127	0,101 %	5	0,077 %	132	0,100 %
SOPIR	1.387	1,101 %	2	0,031 %	1.389	1,049 %
TABIB	8	0,006 %	1	0,015 %	9	0,007 %
TENTARA NASIONAL INDONESIA/TNI	3.598	2,856 %	23	0,355 %	3.621	2,733 %
TRANSPORTASI	308	0,244 %	1	0,015 %	309	0,233 %
TUKANG BATU	59	0,047 %			59	0,045 %
TUKANG CUKUR	37	0,029 %			37	0,028 %
TUKANG GIGI	3	0,002 %			3	0,002 %
TUKANG JAHIT	241	0,191 %	26	0,401 %	267	0,202 %
TUKANG KAYU	225	0,179 %			225	0,170 %

JENIS PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	n	%	n	%
TUKANG LAS/PANDAI BESI	64	0,051 %			64	0,048 %
TUKANG LISTRIK	54	0,043 %			54	0,041 %
TUKANG SOL SEPATU	16	0,013 %	1	0,015 %	17	0,013 %
USTADZ/MUBALIGH	137	0,109 %	1	0,015 %	138	0,104 %
WAKIL WALIKOTA	1	0,001 %			1	0,001 %
WALIKOTA	1	0,001 %			1	0,001 %
WARTAWAN	56	0,044 %			56	0,042 %
WIRASWASTA	24.390	19,359 %	1.112	17,155 %	25.502	19,251 %
KOTA CIMAHI	125.986	100,00 %	6.482	100,00 %	132.468	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Dari tabel. 4.28 terlihat bahwa kepala keluarga di Kota Cimahi paling banyak bekerja sebagai karyawan swasta yaitu 41,883 persen, diikuti menjadi wiraswasta yakni 19,251 persen, dan 17,869 persen menjadi buruh harian lepas.

D. Sosial

1. Penduduk Menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

TABEL. 4.29

JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN AGAMA, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

AGAMA DAN KEPERCAYAAN	KECAMATAN						JUMLAH	
	CIMAHI SELATAN		CIMAHI TENGAH		CIMAHI UTARA			
	n	%	n	%	n	%		
ISLAM	213.268	94,30 %	146.366	94,06 %	144.454	93,86 %	504.088	94,10 %
KRISTEN	8.917	3,94 %	6.362	4,09 %	6.732	4,37 %	22.011	4,11 %
KATHOLIK	3.381	1,49 %	2.254	1,45 %	2.322	1,51 %	7.957	1,49 %
BUDHA	348	0,15 %	358	0,23 %	175	0,11 %	881	0,16 %
HINDU	154	0,07 %	268	0,17 %	167	0,11 %	589	0,11 %
KHONG HUCU	12	0,01 %	1	0,001 %			13	0,002 %
P KEPERCAYAAN	87	0,04 %	1	0,001 %	58	0,04 %	146	0,03 %
KOTA CIMAHI	226.167	100,00 %	155.610	100,00 %	153.908	100,00 %	535.685	100,00 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 4.29 menggambarkan agama yang dianut penduduk Kota Cimahi, nampak bahwa 94,10 persen penduduk Kota Cimahi beragama Islam, diikuti 4,11 persen agama Kristen, 1,49 persen beragama Katholik, dan

Khonghucu merupakan agama dengan penganut terendah yakni 0,03 persen.

Jika dilihat menurut wilayah, tampak semua wilayah kecamatan di Kota Cimahi didominasi penduduk muslim dan diikuti agama kristen, sedangkan Khonghucu merupakan agama dengan jumlah terendah yang dianut penduduk Kota Cimahi.

2. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan).

Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah terhadap penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk itu, informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam menyusun program pelayanan publik yang ramah kaum difabel. Oleh sebab itu, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan

bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang cacat). Sumber data yang diolah adalah hasil registrasi penduduk melalui SIAK.

Pada tabel 4.30 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas yang tercatat dalam database kependudukan di Kota Cimahi adalah sebanyak 1.018 jiwa, jumlah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kota Cimahi yaitu 535.685 jiwa. Meskipun jumlahnya kecil, penduduk penyandang cacat atau kaum difabel ini tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi dan tetap wajib memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kewirausahaan, terbebas dari diskriminasi, terbebas dari penelantaran, terbebas dari eksploitasi, dan fasilitas layanan umum lainnya. Kecilnya jumlah penyandang disabilitas yang terdapat dalam database SIAK, diduga dikarenakan banyak penyandang disabilitas atau keluarganya yang enggan untuk menyatakan dirinya atau keluarganya tersebut sebagai penyandang cacat pada saat melakukan pelayanan kependudukan.

TABEL 4.30
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN, DAN JENIS KELAMIN , KOTA CIMAH I, TAHUN 2017

KECAMATAN DAN KELURAHAN	CACAT FISIK	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT MENTAL / JIWA	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU/ WICARA	CACAT LAINNYA	JUMLAH
LAKI-LAKI	210	20	181	69	87	67	634
CIMAH I SELATAN	89	6	64	29	25	21	234
KEL. CIBEBER	15	1	9	2	3	2	32
KEL. CIBEUREUM	18	1	9	6	4	3	41
KEL. LEUWIGAJAH	8	1	11	8	6	5	39
KEL. MELONG	36	1	26	10	6	9	88
KEL. UTAMA	12	2	9	3	6	2	34
CIMAH I TENGAH	67	8	61	17	35	40	228
KEL. BAROS	10		14		2	2	28
KEL. CIGUGUR TENGAH	20	4	10	3	6	6	49
KEL. CIMAH I	2	2	10	4	5	3	26
KEL. KARANGMEKAR	11		7	1	7	4	30
KEL. PADASUKA	9		10	8	10	12	49
KEL. SETIAMANAH	15	2	10	1	5	13	46
CIMAH I UTARA	54	6	56	23	27	6	172
KEL. CIBABAT	17	1	16	9	10	5	58
KEL. CIPAGERAN	23	2	24	5	7		61
KEL. CITEUREUP	6	3	11	6	4	1	31
KEL. PASIRKALIKI	8		5	3	6		22

KECAMATAN DAN KELURAHAN	CACAT FISIK	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT MENTAL / JIWA	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU/ WICARA	CACAT LAINNYA	JUMLAH
PEREMPUAN	135	14	85	36	75	39	384
CIMAHI SELATAN	58		23	17	16	7	121
KEL. CIBEBER	8		4	2	2	1	17
KEL. CIBEUREUM	11		5	2		1	19
KEL. LEUWIGAJAH	16		4	5	3	2	30
KEL. MELONG	15		9	6	6	2	38
KEL. UTAMA	8		1	2	5	1	17
CIMAHI TENGAH	41	8	34	11	27	25	146
KEL. BAROS	4		2	2	2	3	13
KEL. CIGUGUR TENGAH	7	3	11	2	6	5	34
KEL. CIMAHI	4	1	4	1	7	2	19
KEL. KARANGMEKAR	7	1	4	1	4	3	20
KEL. PADASUKA	12	2	7	4	6	5	36
KEL. SETIAMANAH	7	1	6	1	2	7	24
CIMAHI UTARA	36	6	28	8	32	7	117
KEL. CIBABAT	11	2	9	1	7	3	33
KEL. CIPAGERAN	13	2	11	2	16	4	48
KEL. CITEUREUP	7	2	6	4	4		23
KEL. PASIRKALIKI	5		2	1	5		13
KOTA CIMAHI (L+P)	345	34	266	105	162	106	1.018
CIMAHI SELATAN	147	6	87	46	41	28	355
KEL. CIBEBER	23	1	13	4	5	3	49
KEL. CIBEUREUM	29	1	14	8	4	4	60
KEL. LEUWIGAJAH	24	1	15	13	9	7	69
KEL. MELONG	51	1	35	16	12	11	126
KEL. UTAMA	20	2	10	5	11	3	51
CIMAHI TENGAH	108	16	95	28	62	65	374
KEL. BAROS	14		16	2	4	5	41
KEL. CIGUGUR TENGAH	27	7	21	5	12	11	83
KEL. CIMAHI	6	3	14	5	12	5	45
KEL. KARANGMEKAR	18	1	11	2	11	7	50
KEL. PADASUKA	21	2	17	12	16	17	85
KEL. SETIAMANAH	22	3	16	2	7	20	70
CIMAHI UTARA	90	12	84	31	59	13	289
KEL. CIBABAT	28	3	25	10	17	8	91
KEL. CIPAGERAN	36	4	35	7	23	4	109
KEL. CITEUREUP	13	5	17	10	8	1	54
KEL. PASIRKALIKI	13		7	4	11		35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika dilihat menurut jenis kecacatan, jumlah penduduk penyandang disabilitas terbesar adalah penduduk dengan cacat fisik yakni 345 orang, diikuti cacat mental/jiwa 266 orang, cacat rungu/wicara 162 orang, cacat lainnya sebanyak 106 orang, dan buta/tuna netra 105 orang. Sedangkan penyandang cacat fisik dan mental 34 orang.

Tabel 4.30 juga menunjukkan bahwa Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak yakni 374 orang dan Kecamatan Cimahi Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terendah yakni 289 orang.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih besar (634 orang) dibandingkan penyandang disabilitas perempuan (384 orang).

Adapun jenis kecacatan yang banyak disandang laki-laki adalah cacat fisik (210 orang) dan diikuti cacat mental/jiwa 181 orang, sedangkan untuk perempuan cacat fisik (135 orang) dan diikuti cacat mental/jiwa 85 orang.

TABEL. 4.31
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT
KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	CACAT FISIK	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT MENTAL / JIWA	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU/ WICARA	CACAT LAINNYA	JUMLAH
LAKI-LAKI	210	20	181	69	87	67	633
0-4	3						3
5-9	4		1		1	1	7
10-14	10	3		6	5	3	27
15-19	12	4	9	3	7	9	43
20-24	12		8	1	6	10	37
25-29	13	1	19		14	4	51
30-34	24	1	19	6	7	4	61
35-39	24	3	26	9	7	7	76
40-44	24	2	30	7	9	6	78
45-49	17	3	19	9	10	4	62
50-54	22	1	23	10	8	4	68
55-59	13	1	8	6	6	5	39
60-64	15		11	4	2	4	36
65-69	9	1	6	2	1	3	22
70-74	3		2	5	1	2	13
≥75	5			1	3	1	10
PEREMPUAN	135	14	85	36	75	39	384
0-4							
5-9	1				1	2	4
10-14	5	2	3	1	3	3	17
15-19	9	3	5		5	6	28
20-24	5	1	4	2	8	2	22
25-29	8	1	11	3	5	5	33
30-34	11	1	7		7	7	33
35-39	12	1	12	6	15	4	50
40-44	15	1	8	5	7	1	37
45-49	9	1	12	5	7	2	36
50-54	20	1	12	2	5	2	42
55-59	11		3	4	2	1	21
60-64	11	1	4	4	4	2	26
65-69	11		3	2	2	1	19
70-74	3		1	1	2		7
≥75	4	1		1	2	1	9

KELOMPOK UMUR	CACAT FISIK	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT MENTAL / JIWA	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU/ WICARA	CACAT LAINNYA	JUMLAH
KOTA CIMAHU (L+P)	345	34	266	105	162	106	1.018
0-4	3						3
5-9	5		1		2	3	11
10-14	15	5	3	7	8	6	44
15-19	21	7	14	3	12	15	72
20-24	17	1	12	3	14	12	59
25-29	21	2	30	3	19	9	84
30-34	35	2	26	6	14	11	94
35-39	36	4	38	15	22	11	126
40-44	39	3	38	12	16	7	115
45-49	26	4	31	14	17	6	98
50-54	42	2	35	12	13	6	110
55-59	24	1	11	10	8	6	60
60-64	26	1	15	8	6	6	62
65-69	20	1	9	4	3	4	41
70-74	6		3	6	3	2	20
≥75	9	1		2	5	2	19

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika penduduk penyandang disabilitas ini dikaitkan dengan kelompok umur, dari tabel 4.31 terlihat bahwa dari 1.018 orang penyandang disabilitas 880 orang adalah kelompok usia produktif, 80 orang adalah kelompok usia tua (usila), 58 orang kelompok usia 14 tahun ke bawah. Tabel 4.31 juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tertinggi pada kelompok usia 35-44 tahun dan 50-54 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menghapus praktek-praktek yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh

informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

sedangkan ayat (2) bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya ayat (3) bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Berkaitan berkaitan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, maka sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; Pasal 51 Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus; Pasal 70 Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya: a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus; c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; "Pasal 76A Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Untuk itu, langkah yang perlu ditempuh Pemerintah Kota Cimahi harus menghapus hambatan terhadap aksesibilitas yakni dengan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan menjamin akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem

informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau sarana umum baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan.

Selanjutnya berkaitan dengan akses kerja penyandang disabilitas, komitmen pemerintah dalam peningkatan persamaan hak untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap orang Indonesia termasuk penyandang cacat telah tertuang dan diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27 : (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D : (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 11 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi yang meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

3. Golongan Darah

Golongan darah adalah klasifikasi yang menentukan darah yang dimiliki dengan melihat jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah yang diturunkan dari orang tua. Antigen berupa dalam gugus kimia yang tergantung dari golongan darah tersebut. Ada 32 golongan darah yang dikenal oleh Perkumpulan Internasional Transfusi Darah. Tetapi terdapat dua antigen yang paling perlu dipertimbangkan saat transfusi yaitu golongan darah berdasarkan sistem ABO dan rhesus (tipe A, B, AB, dan O dengan Rhesus + dan -).

Sistem ABO merupakan pemeriksaan darah yang paling mendasar dilakukan dalam transfusi darah. Antibodi anti-A dan anti-B biasanya merupakan immunoglobulin M atau dikenal dengan IgM. Antibodi IgM ABO diproduksi pada satu tahun usia kehidupan.

Sistem rhesus atau Rh merupakan golongan darah nomor dua yang paling signifikan dalam transfusi darah manusia. Golongan darah rhesus negatif tidak umum pada populasi manusia di Asia dan hanya berkisar sekitar

0,3% dibandingkan dengan orang kulit putih yang berkisar 15%. Ada atau tidaknya antigen rhesus ditandai dengan tanda + atau -, pada contoh orang dengan golongan darah A- menunjukkan tidak mempunyai antigen rhesus.

Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya, sebagai berikut:

- a. Golongan darah A adalah Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah A-negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A-negatif atau O-negatif.
- b. Golongan darah B adalah Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah B-negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah B-negatif atau O-negatif.
- c. Golongan darah AB adalah Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. Sehingga, orang dengan golongan darah AB-positif dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut resipien universal. Namun, orang dengan golongan darah AB-positif tidak dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB-positif.
- d. Golongan darah O adalah Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga, orang dengan golongan darah O-negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut donor universal. Namun, orang dengan golongan darah O-negatif hanya dapat menerima darah dari sesama O-negatif.

Dari tabel 4.32 tampak bahwa separuh (55,56%) penduduk Kota Cimahi tidak mengetahui golongan darah mereka, diduga mereka tidak memahami akan arti pentingnya mengetahui golongan darah.

Mengetahui jenis golongan darah menjadi suatu hal yang penting misalnya saat akan melakukan transfusi darah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tranfusi darah pada pendonor darah adalah jenis aglutinogen dalam eritrosit, sedangkan pada resipien adalah jenis aglutinin dalam plasma darah. Orang yang mendapat darah disebut resipien dan orang yang memberi darah disebut donor. Sel darah yang diberikan kepada resipien berupa senyawa protein. Apabila senyawa ini tidak sesuai, maka senyawa tersebut akan bersifat sebagai antigen. Sel darah akan digumpalkan atau mengalami aglutinasi.

Tiap-tiap orang memiliki golongan darah tertentu, ini berarti bahwa sel darah seseorang mengandung zat aglutinogen tertentu dan plasma darahnya dapat membuat aglutinin tertentu pula. Jadi, mengetahui golongan darah diri sendiri merupakan sesuatu yang penting.

TABEL. 4.32
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DAN JENIS KELAMIN, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

GOLONGAN DARAH DAN JENIS KELAMIN	KECAMATAN						JUMLAH	
	CIMAH SELATAN		CIMAH TENGAH		CIMAH UTARA			
	n	%	n	%	n	%		
LAKI-LAKI	114.182	50,49 %	78.336	50,34 %	77.746	50,51 %	270.264	50,45 %
A	9.082	4,02 %	8.779	5,64 %	7.854	5,10 %	25.715	4,80 %
A-	11	0,00 %	10	0,01 %	19	0,01 %	40	0,01 %
A+	197	0,09 %	222	0,14 %	247	0,16 %	666	0,12 %
AB	4.789	2,12 %	5.289	3,40 %	3.865	2,51 %	13.943	2,60 %
AB-	42	0,02 %	34	0,02 %	18	0,01 %	94	0,02 %
AB+	60	0,03 %	147	0,09 %	63	0,04 %	270	0,05 %
B	9.456	4,18 %	9.297	5,97 %	8.041	5,22 %	26.794	5,00 %
B-	17	0,01 %	14	0,01 %	13	0,01 %	44	0,01 %
B+	76	0,03 %	213	0,14 %	100	0,06 %	389	0,07 %
O	17.700	7,83 %	18.377	11,81 %	14.204	9,23 %	50.281	9,39 %
O-	104	0,05 %	66	0,04 %	76	0,05 %	246	0,05 %
O+	101	0,04 %	182	0,12 %	118	0,08 %	401	0,07 %
TIDAK TAHU	72.547	32,08 %	35.706	22,95 %	43.128	28,02 %	151.381	28,26 %
PEREMPUAN	111.985	49,51 %	77.274	49,66 %	76.162	49,49 %	265.421	49,55 %
A	9.274	4,10 %	9.205	5,92 %	8.518	5,53 %	26.997	5,04 %
A-	16	0,01 %	19	0,01 %	21	0,01 %	56	0,01 %
A+	196	0,09 %	263	0,17 %	223	0,14 %	682	0,13 %
AB	4.873	2,15 %	5.151	3,31 %	4.006	2,60 %	14.030	2,62 %
AB-	44	0,02 %	39	0,03 %	39	0,03 %	122	0,02 %
AB+	93	0,04 %	158	0,10 %	84	0,05 %	335	0,06 %
B	10.299	4,55 %	10.082	6,48 %	8.380	5,44 %	28.761	5,37 %
B-	25	0,01 %	20	0,01 %	19	0,01 %	64	0,01 %
B+	76	0,03 %	223	0,14 %	117	0,08 %	416	0,08 %
O	16.480	7,29 %	17.070	10,97 %	13.581	8,82 %	47.131	8,80 %
O-	94	0,04 %	53	0,03 %	76	0,05 %	223	0,04 %
O+	83	0,04 %	195	0,13 %	106	0,07 %	384	0,07 %
TIDAK TAHU	70.432	31,14 %	34.796	22,36 %	40.992	26,63 %	146.220	27,30 %
KOTA CIMAH (L+P)	226.167	100,00 %	155.610	100,00 %	153.908	100,00 %	535.685	100,00 %
A	18.356	8,12 %	17.984	11,56 %	16.372	10,64 %	52.712	9,84 %
A-	27	0,01 %	29	0,02 %	40	0,03 %	96	0,02 %
A+	393	0,17 %	485	0,31 %	470	0,31 %	1.348	0,25 %
AB	9.662	4,27 %	10.440	6,71 %	7.871	5,11 %	27.973	5,22 %
AB-	86	0,04 %	73	0,05 %	57	0,04 %	216	0,04 %
AB+	153	0,07 %	305	0,20 %	147	0,10 %	605	0,11 %
B	19.755	8,73 %	19.379	12,45 %	16.421	10,67 %	55.555	10,37 %
B-	42	0,02 %	34	0,02 %	32	0,02 %	108	0,02 %
B+	152	0,07 %	436	0,28 %	217	0,14 %	805	0,15 %
O	34.180	15,11 %	35.447	22,78 %	27.785	18,05 %	97.412	18,18 %
O-	198	0,09 %	119	0,08 %	152	0,10 %	469	0,09 %
O+	184	0,08 %	377	0,24 %	224	0,15 %	785	0,15 %
TIDAK TAHU	142.979	63,22 %	70.502	45,31 %	84.120	54,66 %	297.601	55,56 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Adapun alasan lainnya untuk mengetahui golongan darah adalah menghindari resiko penyakit, membantu memantau program diet, resiko penggumpalan darah, test DNA, dan sebagainya.

BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Istilah mobiltas penduduk diartikan menjadi gerak penduduk seperti yang dinyatakan oleh Mantra (1985:15) “Mobilitas penduduk yaitu semua gerak penduduk dalam (waktu tertentu dan batas (wilayah administrasi tertentu seperti batas propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya”. Peranan mobilitas penduduk terhadap laju pertumbuhan penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda-beda.

Pertumbuhan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu, mortalitas dan mobilitas penduduk.

Mobilitas penduduk memiliki kaitan erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk dan begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas dari pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Mobilitas dilakukan untuk mempertahankan hidup dan disebabkan karena adanya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahannya penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen (migrasi) dan ada yang bersifat non permanen. Pada dasarnya penduduk yang melakukan mobilitas dari wilayah satu ke wilayah lainnya bertujuan untuk menetap di wilayah yang dikunjunginya. Namun adakalanya mereka berpindah untuk sementara waktu baik dalam waktu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin lebih lama lagi. Mobilitas penduduk semacam ini disebut mobilitas penduduk non permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan mobilitas penduduk non permanen dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi

Mobilitas permanen atau migrasi itu terbagi menjadi 2 (dua) yakni migrasi internasional dan migrasi nasional (dalam negeri). Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah migrasi nasional baik migrasi masuk maupun keluar.

TABEL 5.1
ANGKA MIGRASI MASUK, ANGKA MIGRASI KELUAR, DAN
ANGKA MIGRASI NETTO MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN,
KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		ANGKA MIGRASI		
	MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	NETTO
CIMAHI SELATAN	3.147	3.229	13,95	14,32	-0,36
KEL. CIBEBER	364	321	13,73	12,11	1,62
KEL. CIBEUREUM	844	834	14,23	14,06	0,17
KEL. LEUWIGAJAH	531	514	12,24	11,85	0,39
KEL. MELONG	928	1.106	14,83	17,68	-2,84
KEL. UTAMA	480	454	14,24	13,47	0,77
CIMAHI TENGAH	2.484	2.239	16,00	14,42	1,58
KEL. BAROS	453	356	22,42	17,62	4,80
KEL. CIGUGUR TENGAH	599	638	13,02	13,86	-0,85
KEL. CIMAHI	220	161	17,38	12,72	4,66
KEL. KARANGMEKAR	256	242	16,13	15,25	0,88
KEL. PADASUKA	556	483	14,69	12,77	1,93
KEL. SETIAMANAH	400	359	17,68	15,87	1,81
CIMAHI UTARA	2.330	1.853	15,25	12,13	3,12
KEL. CIBABAT	757	665	14,53	12,76	1,77
KEL. CIPAGERAN	739	525	16,08	11,42	4,66
KEL. CITEUREUP	578	408	15,74	11,11	4,63
KEL. PASIRKALIKI	256	255	14,22	14,16	0,06
KOTA CIMAHI	7.961	7.321	14,92	13,72	1,20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah penduduk yang masuk (datang) ke Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 7.961 jiwa dan jumlah penduduk yang keluar (pindah) dari Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 7.321 jiwa. Perbandingan antara penduduk yang masuk (datang) dan keluar (pindah) adalah 1,1:1 artinya pada tahun 2017 bahwa dari 1-2 penduduk yang masuk ke Kota Cimahi terdapat 1(satu) penduduk yang keluar dari Kota Cimahi.

Dari table 5.1 juga terlihat bahwa angka migrasi penduduk masuk Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 14,92 yang berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kota Cimahi terdapat 14-15 penduduk masuk ke Kota Cimahi dan angka migrasi keluar penduduk Kota Cimahi tahun 2017 sebesar 13,72 yang berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kota Cimahi terdapat 13-14 penduduk keluar dari Kota Cimahi.

Jika diperhatikan menurut kecamatan, maka Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan angka migrasi masuk dan angka migrasi keluar tertinggi, sedangkan Kecamatan Cimahi Utara merupakan kecamatan dengan angka migrasi netto tertinggi yakni 3,12 yang mencerminkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 3 penduduk yang masuk ke Kecamatan Cimahi Utara.

Selanjutnya dilihat dari wilayah kelurahan, maka Kelurahan Baros merupakan kelurahan dengan angka migrasi masuk tertinggi yakni 22,42, sedangkan kelurahan dengan angka migrasi masuk terendah adalah Kelurahan Leuwigajah yakni 12,24.

Sementara Kelurahan Melong adalah kelurahan dengan angka migrasi keluar tertinggi dan Kelurahan Citeureup merupakan kelurahan dengan angka migrasi keluar terendah yakni 11,11.

Dari table 5.1 di atas juga menunjukkan bahwa migrasi yang terjadi di Kota Cimahi adalah migrasi positif, dimana migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar. Walaupun penduduk mempunyai hak dapat bertempat tinggal dimana saja dalam wilayah NKRI, namun pemerintah Kota Cimahi tetap harus membuat suatu kebijakan yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena apabila tidak terkendali, maka Kota Cimahi akan menjadi kota yang sangat padat.

Pada hakikatnya migrasi penduduk merupakan cermin dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain atau dengan kata lain adalah adanya kesenjangan satu daerah dengan daerah lain. Penduduk yang berada di daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah cenderung akan berpindah menuju daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berikut ini adalah lima implikasi kebijakan yang paling penting.

1. Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi.
2. Pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di kota tetapi juga kesempatan kerja di pedesaan dalam waktu bersamaan.
3. Program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu

BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk serta merupakan perlindungan dan pengakuan negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW.

Manfaat dokumen kependudukan antara lain :

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok).
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang menunjukkan hubungan kekerabatan dalam keluarga, dalam kartu keluarga memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain. Yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu Kepala Keluarga. Seorang penduduk tidak boleh menjadi kepala keluarga di dua keluarga berbeda. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bersuami juga bisa menjadi kepala keluarga misal karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki atau karena tidak satu tempat tinggal dengan suami misal karena suaminya kerja merantau di luar daerah untuk waktu yang lama.

TABEL. 6.1
PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA	PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA
CIMAHI SELATAN	68.168	68.168	100,00%
KEL. CIBEBER	8.083	8.083	100,00%
KEL. CIBEUREUM	17.833	17.833	100,00%
KEL. LEUWIGAJAH	13.100	13.100	100,00%
KEL. MELONG	18.574	18.574	100,00%
KEL. UTAMA	10.578	10.578	100,00%
CIMAHI TENGAH	48.026	48.026	100,00%
KEL. BAROS	6.518	6.518	100,00%
KEL. CIGUGUR TENGAH	13.974	13.974	100,00%
KEL. CIMAHI	4.068	4.068	100,00%
KEL. KARANGMEKAR	5.013	5.013	100,00%
KEL. PADASUKA	11.561	11.561	100,00%
KEL. SETIAMANAH	6.892	6.892	100,00%
CIMAHI UTARA	46.068	46.068	100,00%
KEL. CIBABAT	15.611	15.611	100,00%
KEL. CIPAGERAN	13.818	13.818	100,00%
KEL. CITEUREUP	11.185	11.185	100,00%
KEL. PASIRKALIKI	5.454	5.454	100,00%
KOTA CIMAHI	162.262	162.262	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 6.1 menunjukkan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga SIAK di Kota Cimahi tahun 2017. Terlihat bahwa seluruh keluarga di Kota Cimahi sudah memiliki Kartu Keluarga SIAK.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin yang dalam hal ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tahun 2011 mulai diterapkan program KTP elektronik, adapun program KTP elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)
5. Memalsukan dan menggandakan KTP.

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan e-Government serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik yang singkat KTP-el.

Terkait KTP-el berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan *semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2017*. Sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup.

"Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemen datanya.

Adapun fungsi KTP-el "Sebagai identitas jati diri; Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan

TABEL. 6.2
PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK, KOTA CIMAHI,
TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK WAJIB KTP	PENDUDUK YG MEMILIKI KTPel	PERSENTASE KEPEMILIKAN KTPel
CIMAHI SELATAN	164.121	134.729	82,09%
KEL. CIBEBER	19.236	16.497	85,76%
KEL. CIBEUREUM	42.972	37.852	88,09%
KEL. LEUWIGAJAH	31.699	26.889	84,83%
KEL. MELONG	46.210	40.214	87,02%
KEL. UTAMA	24.004	13.277	55,31%
CIMAHI TENGAH	113.672	95.814	84,29%
KEL. BAROS	15.066	13.024	86,45%
KEL. CIGUGUR TENGAH	33.146	29.356	88,57%
KEL. CIMAHI	9.357	5.648	60,36%
KEL. KARANGMEKAR	11.963	7.688	64,26%
KEL. PADASUKA	27.525	24.830	90,21%
KEL. SETIAMANAH	16.615	15.268	91,89%
CIMAHI UTARA	112.327	89.859	80,00%
KEL. CIBABAT	38.197	24.279	63,56%
KEL. CIPAGERAN	33.752	30.383	90,02%
KEL. CITEUREUP	26.948	23.098	85,71%
KEL. PASIRKALIKI	13.430	12.099	90,09%
KOTA CIMAHI	390.120	320.402	82,13%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa dari 390.120 jiwa wajib KTP tahun 2017, 320.402 jiwa atau 82,13 persen sudah memiliki KTPel., hal ini diduga karena penduduk yang pindah atau keluar dari Kota Cimahi adalah penduduk yang sudah memiliki KTPel, sedangkan penduduk yang masuk atau datang ke Kota Cimahi mereka belum memperoleh KTPel walaupun mungkin mereka sudah melakukan perekaman di daerah asalnya atau karena meninggal. Sejalan dengan pelaksanaan program Pemerintah tentang KTPel, penduduk yang masih mempunyai KTP reguler akan diubah KTP nya menjadi KTPel.

Diharapkan di tahun 2018 kepemilikan KTP-el penduduk Kota Cimahi dapat mencapai 98 persen.

C. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

TABEL 6.3
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN, KOTA CIMAHI,
TAHUN 2017

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA	PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
CIMAHI SELATAN	226.167	91.294	134.873	40,37 %	59,63 %
KEL. CIBEBER	26.662	12.941	13.721	48,54 %	51,46 %
KEL. CIBEUREUM	59.569	22.077	37.492	37,06 %	62,94 %
KEL. LEUWIGAJAH	43.546	20.187	23.359	46,36 %	53,64 %
KEL. MELONG	62.604	23.673	38.931	37,81 %	62,19 %
KEL. UTAMA	33.786	12.416	21.370	36,75 %	63,25 %
CIMAHI TENGAH	155.610	73.773	81.837	47,41 %	52,59 %
KEL. BAROS	20.141	9.431	10.710	46,82 %	53,18 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	46.131	21.815	24.316	47,29 %	52,71 %
KEL. CIMAHI	12.692	6.032	6.660	47,53 %	52,47 %
KEL. KARANGMEKAR	15.937	7.715	8.222	48,41 %	51,59 %
KEL. PADASUKA	38.065	18.051	20.014	47,42 %	52,58 %
KEL. SETIAMANAH	22.644	10.729	11.915	47,38 %	52,62 %
CIMAHI UTARA	153.908	65.965	87.943	42,86 %	57,14 %
KEL. CIBABAT	52.274	22.626	29.648	43,28 %	56,72 %
KEL. CIPAGERAN	46.494	20.222	26.272	43,49 %	56,51 %
KEL. CITEUREUP	37.044	15.568	21.476	42,03 %	57,97 %
KEL. PASIRKALIKI	18.096	7.549	10.547	41,72 %	58,28 %
KOTA CIMAHI	535.685	231.032	304.653	43,13 %	56,87 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel. 6.3 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Cimahi terhadap total penduduk Kota Cimahi berdasarkan data yang terdapat dalam database SIAK Kota Cimahi, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Cimahi tahun 2017 hanya 43,13 persen (231.032 jiwa). Jika dilihat menurut kecamatan dan kelurahan, maka seluruh kecamatan dan kelurahan persentase kepemilikan akta kelahiran dibawah 50 persen.

Kecilnya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kepemilikan akta kelahiran mereka tidak tercatat di database SIAK. Untuk itu, Kota Cimahi terus menerus melakukan pemutakhiran data terkait dengan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan.

TABEL. 6.4
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MENURUT KELOMPOK UMUR, KOTA CIMAH, TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PENDUDUK		PERSENTASE YG TIDAK MEMILIKI AKTA
			TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	
0-4	34.204	31.202	3.002	91,22 %	8,78 %
5-9	44.640	35.164	9.476	78,77 %	21,23 %
10-14	46.729	35.228	11.501	75,39 %	24,61 %
15-19	46.381	30.006	16.375	64,69 %	35,31 %
20-24	45.578	24.159	21.419	53,01 %	46,99 %
25-29	42.233	15.085	27.148	35,72 %	64,28 %
30-34	42.393	10.716	31.677	25,28 %	74,72 %
35-39	48.193	10.728	37.465	22,26 %	77,74 %
40-44	44.851	9.903	34.948	22,08 %	77,92 %
45-49	40.071	9.394	30.677	23,44 %	76,56 %
50-54	32.003	7.359	24.644	22,99 %	77,01 %
55-59	24.770	5.352	19.418	21,61 %	78,39 %
60-64	17.896	3.290	14.606	18,38 %	81,62 %
65-69	11.112	1.772	9.340	15,95 %	84,05 %
70-74	6.697	938	5.759	14,01 %	85,99 %
>75	7.934	736	7.198	9,28 %	90,72 %
KOTA CIMAH	535.685	231.032	304.653	43,13 %	56,87 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika diperhatikan menurut kelompok umur, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas. Persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi pada kelompok umur 0-4 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk mencatatkan kelahiran anaknya sudah cukup tinggi, selain itu adanya kebijakan terkait percepatan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun.

Tetapi jika diperhatikan bahwa semakin tinggi kelompok umur maka kepemilikan akta kelahiran penduduk semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk belum memahami manfaat akta kelahiran, sehingga menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mengkampanyekan kepemilikan akta kelahiran dan manfaatnya kepada penduduk untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk berperan aktif mengurus akta kelahiran.

TABEL 6.5
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN MENURUT
KECAMATAN DAN KELURAHAN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN DAN KELURAHAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN				
	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG TIDAK MEMILIKI AKTA
CIMAHI SELATAN	69.516	53.918	15.598	77,56 %	22,44 %
KEL. CIBEBER	8.320	6.975	1.345	83,83 %	16,17 %
KEL. CIBEUREUM	18.542	14.120	4.422	76,15 %	23,85 %
KEL. LEUWIGAJAH	13.368	11.101	2.267	83,04 %	16,96 %
KEL. MELONG	18.396	13.579	4.817	73,81 %	26,19 %
KEL. UTAMA	10.890	8.143	2.747	74,78 %	25,22 %
CIMAHI TENGAH	46.994	41.216	5.778	87,70 %	12,30 %
KEL. BAROS	5.647	4.954	693	87,73 %	12,27 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	14.543	12.762	1.781	87,75 %	12,25 %
KEL. CIMAHI	3.737	3.302	435	88,36 %	11,64 %
KEL. KARANGMEKAR	4.496	3.915	581	87,08 %	12,92 %
KEL. PADASUKA	11.772	10.352	1.420	87,94 %	12,06 %
KEL. SETIAMANAH	6.799	5.931	868	87,23 %	12,77 %
CIMAHI UTARA	46.602	38.840	7.762	83,34 %	16,66 %
KEL. CIBABAT	15.741	13.221	2.520	83,99 %	16,01 %
KEL. CIPAGERAN	14.394	11.961	2.433	83,10 %	16,90 %
KEL. CITEUREUP	11.261	9.426	1.835	83,70 %	16,30 %
KEL. PASIRKALIKI	5.206	4.232	974	81,29 %	18,71 %
KOTA CIMAHI	163.112	133.974	29.138	82,14 %	17,86 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 6.5 menjelaskan jumlah penduduk usia 0-18 tahun Kota Cimahi tahun 2017 yang telah memiliki akta kelahiran sebesar 82,14 persen, cakupan ini belum memenuhi target nasional yakni 85 persen dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Jika diperhatikan menurut kecamatan, maka Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan cakupan akta kelahiran tertinggi yakni 87,70 persen dan jika dilihat menurut kelurahan, Kelurahan Cimahi merupakan kelurahan dengan cakupan akta kelahiran tertinggi yakni 88,36 persen.

Selanjutnya kepemilikan akta kelahiran dikaitkan dengan kelompok umur sebagaimana terlihat pada tabel 6.6, tampak bahwa persentase kepemilikan akta lahir penduduk usia 0-3 tahun cukup tinggi yakni di atas 90 persen.

TABEL. 6.6
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN,
KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

UMUR	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE YG TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
0	2.008	1.895	113	94,37 %	5,63 %
1	7.106	6.613	493	93,06 %	6,94 %
2	8.120	7.482	638	92,14 %	7,86 %
3	8.430	7.678	752	91,08 %	8,92 %
4	8.540	6.966	1.574	81,57 %	18,43 %
5	8.629	7.111	1.518	82,41 %	17,59 %
6	8.867	7.130	1.737	80,41 %	19,59 %
7	9.315	7.817	1.498	83,92 %	16,08 %
8	8.972	7.120	1.852	79,36 %	20,64 %
9	8.857	7.037	1.820	79,45 %	20,55 %
10	9.308	7.522	1.786	80,81 %	19,19 %
11	9.147	7.477	1.670	81,74 %	18,26 %
12	9.074	7.389	1.685	81,43 %	18,57 %
13	9.296	7.055	2.241	75,89 %	24,11 %
14	9.904	8.082	1.822	81,60 %	18,40 %
15	9.974	8.291	1.683	83,13 %	16,87 %
16	9.194	7.154	2.040	77,81 %	22,19 %
17	9.850	7.554	2.296	76,69 %	23,31 %
18	8.521	6.601	1.920	77,47 %	22,53 %
KOTA CIMAHI	163.112	133.974	29.138	82,14 %	17,86 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel 6.7 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Cimahi yang berstatus kawin sebanyak 262.321 orang dan yang tercatat memiliki akta kawin hanya 50,33 persen (132.038 orang), sedangkan yang tidak memiliki akta kawin

persentasenya cukup tinggi yakni 49,67 persen (130.283 orang). Hal ini biasa ditemukan diseluruh Indonesia, karena ada diantara penduduk terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara atau penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum mencatatkan akta kawin (buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, karena perkawinan mereka dicatat oleh KUA setempat atau penduduk yang berstatus kawin dan tidak memiliki akta kawin ini diduga saat pengisian formulir biodata penduduk tidak lengkap.

TABEL. 6.7
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KAWIN MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN, KOTA CIMAHI, TAHUN 2017

KECAMATAN DAN KELURAHAN	PENDUDUK			PERSENTASE YANG MEMILIKI AKTA KAWIN	PERSENTASE YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KAWIN
	BERSTATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA KAWIN	TIDAK MEMILIKI AKTA KAWIN		
CIMAHI SELATAN	111.971	51.608	60.363	46,09 %	53,91 %
KEL. CIBEBER	13.358	7.432	5.926	55,64 %	44,36 %
KEL. CIBEUREUM	29.597	12.288	17.309	41,52 %	58,48 %
KEL. LEUWIGAJAH	21.185	12.200	8.985	57,59 %	42,41 %
KEL. MELONG	30.807	12.144	18.663	39,42 %	60,58 %
KEL. UTAMA	17.024	7.544	9.480	44,31 %	55,69 %
CIMAHI TENGAH	75.016	46.979	28.037	62,63 %	37,37 %
KEL. BAROS	9.561	5.464	4.097	57,15 %	42,85 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	22.836	15.591	7.245	68,27 %	31,73 %
KEL. CIMAHI	5.834	3.665	2.169	62,82 %	37,18 %
KEL. KARANGMEKAR	7.497	4.376	3.121	58,37 %	41,63 %
KEL. PADASUKA	18.612	11.269	7.343	60,55 %	39,45 %
KEL. SETIAMANAH	10.676	6.614	4.062	61,95 %	38,05 %
CIMAHI UTARA	75.334	33.451	41.883	44,40 %	55,60 %
KEL. CIBABAT	25.289	10.478	14.811	41,43 %	58,57 %
KEL. CIPAGERAN	22.909	12.233	10.676	53,40 %	46,60 %
KEL. CITEUREUP	18.189	7.135	11.054	39,23 %	60,77 %
KEL. PASIRKALIKI	8.947	3.605	5.342	40,29 %	59,71 %
KOTA CIMAHI	262.321	132.038	130.283	50,33 %	49,67 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Jika dilihat menurut wilayah, Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kawin tertinggi yakni 62,63 persen (28.037 orang) dan Kelurahan Cigugur Tengah merupakan kelurahan dengan persentase kepemilikan akta kawin tertinggi yakni 68,27 persen (7.245 orang).

Jika dikaitkan dengan kelompok umur, terlihat bahwa masih banyak terdapat perkawinan usia muda yakni kelompok umur 15-19 tahun yakni sebesar 739 orang dan yang memiliki akta kawin sebesar 225 orang (30,45%), sedangkan yang tidak memiliki akta kawin sebesar 69,55 persen (514 orang).

TABEL. 6.8
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KAWIN MENURUT KELOMPOK UMUR, KOTA CIMAHI,
TAHUN 2017

KELOMPOK UMUR	BERSTATUS KAWIN	PENDUDUK		PERSENTASE YANG MEMILIKI AKTA KAWIN	PERSENTASE YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KAWIN
		MEMILIKI AKTA KAWIN	TIDAK MEMILIKI AKTA		
15-19	420	156	264	37,14 %	62,86 %
20-24	7.907	3.035	4.872	38,38 %	61,62 %
25-29	23.795	10.074	13.721	42,34 %	57,66 %
30-34	33.432	16.051	17.381	48,01 %	51,99 %
35-39	42.096	21.392	20.704	50,82 %	49,18 %
40-44	40.002	21.551	18.451	53,87 %	46,13 %
45-49	35.699	19.606	16.093	54,92 %	45,08 %
50-54	28.023	15.075	12.948	53,80 %	46,20 %
55-59	20.898	10.941	9.957	52,35 %	47,65 %
60-64	14.169	7.107	7.062	50,16 %	49,84 %
65-69	7.938	3.698	4.240	46,59 %	53,41 %
70-74	4.209	1.861	2.348	44,21 %	55,79 %
>75	3.733	1.491	2.242	39,94 %	60,06 %
KOTA CIMAHI	262.321	132.038	130.283	50,33 %	49,67 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Kelompok umur 35-59 tahun merupakan kelompok umur tertinggi yang memiliki akta kawin, sedangkan kelompok umur tertinggi yang tidak mempunyai akta perkawinan 15-24 tahun dan 75 tahun ke atas. Untuk itu peran pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus aktif memberikan sosialisasi manfaat memiliki akta kawin.

3. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel. 6.7 menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian di Kota Cimahi.

TABEL 6.9
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA CERAI MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN, KOTA CIMAHI,
TAHUN 2017

KECAMATAN DAN KELURAHAN	BERSTATUS CERAI	PENDUDUK		PERSENTASE YANG MEMILIKI AKTA CERAI	PERSENTASE YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CERAI
		MEMILIKI AKTA CERAI	TIDAK MEMILIKI AKTA CERAI		
CIMAHI SELATAN	3.366	814	2.552	24,18 %	75,82 %
KEL. CIBEBER	405	101	304	24,94 %	75,06 %
KEL. CIBEUREUM	866	216	650	24,94 %	75,06 %
KEL. LEUWIGAJAH	686	206	480	30,03 %	69,97 %
KEL. MELONG	872	182	690	20,87 %	79,13 %
KEL. UTAMA	537	109	428	20,30 %	79,70 %
CIMAHI TENGAH	2.950	1.093	1.857	37,05 %	62,95 %
KEL. BAROS	387	163	224	42,12 %	57,88 %
KEL. CIGUGUR TENGAH	696	244	452	35,06 %	64,94 %
KEL. CIMAHI	335	129	206	38,51 %	61,49 %
KEL. KARANGMEKAR	351	127	224	36,18 %	63,82 %
KEL. PADASUKA	680	257	423	37,79 %	62,21 %
KEL. SETIAMANAH	501	173	328	34,53 %	65,47 %
CIMAHI UTARA	2.535	528	2.007	20,83 %	79,17 %
KEL. CIBABAT	883	195	688	22,08 %	77,92 %
KEL. CIPAGERAN	735	155	580	21,09 %	78,91 %
KEL. CITEUREUP	646	134	512	20,74 %	79,26 %
KEL. PASIRKALIKI	271	44	227	16,24 %	83,76 %
KOTA CIMAHI	8.851	2.435	6.416	27,51 %	72,49 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 6.8 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup dan kepemilikan akta cerai di Kota Cimahi. Terlihat bahwa 9.687 orang yang cerai hidup yang memiliki akta cerai 1.987 orang dan 7.700 orang tidak memiliki akta cerai. Besarnya penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian diduga penduduk berstatus cerai hidup ini tidak mencatatkan perceraian. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurang pemahannya penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan diduga karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kelompok umur yang ada pada Tabel 6.9, terlihat bahwa adanya penduduk dari kelompok usia 15-19 tahun yang berstatus cerai dan tidak memiliki akta cerai. Seharusnya penduduk usia 15-19 tahun ini masih duduk dibangku sekolah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

TABEL. 6.10
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA CERAI MENURUT KELOMPOK UMUR, KOTA
CIMAHI, TAHUN 2016

KELOMPOK UMUR	BERSTATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK		PERSENTASE YANG MEMILIKI AKTA CERAI	PERSENTASE YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CERAI
		MEMILIKI AKTA CERAI	TIDAK MEMILIKI AKTA CERAI		
15-19	3	1	2	33,33 %	66,67 %
20-24	98	45	53	45,92 %	54,08 %
25-29	362	174	188	48,07 %	51,93 %
30-34	779	317	462	40,69 %	59,31 %
35-39	1.196	432	764	36,12 %	63,88 %
40-44	1.453	455	998	31,31 %	68,69 %
45-49	1.449	384	1.065	26,50 %	73,50 %
50-54	1.264	280	984	22,15 %	77,85 %
55-59	917	165	752	17,99 %	82,01 %
60-64	660	111	549	16,82 %	83,18 %
65-69	320	40	280	12,50 %	87,50 %
70-74	171	20	151	11,70 %	88,30 %
>75	179	11	168	6,15 %	93,85 %
KOTA CIMAHI	8.851	2.435	6.416	27,51 %	72,49 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2017, diolah

Tabel 6.9 juga menunjukkan bahwa penduduk Kota Cimahi yang berstatus cerai hidup hanya 20,51 persen yang memiliki akta cerai dan 79,49% tidak memiliki akta cerai. Tingginya persentase penduduk yang berstatus cerai yang tidak memiliki akta cerai diduga mereka tidak mencatatkan perceraianya terutama penduduk muslim karena yang mengeluarkan surat cerai adalah pengadilan agama.

Dengan kecilnya kepemilikan akta baik akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian, maka perlu adanya kebijakan yang berkaitan sosialisasi akan pentingnya mencatatkan peristiwa penting atau kepemilikan akta atau melakukan pemutakhiran data penduduk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, karena jika menunggu penduduk yang aktif data tidak akan termutakhirkan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2018 yang merupakan gambaran perkembangan kependudukan Kota Cimahi pada Tahun 2017. Dimana data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersimpan dalam database kependudukan SIAK Kota Cimahi bulan Desember Tahun 2017 yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cimahi ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan baik nasional maupun daerah dan juga bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.